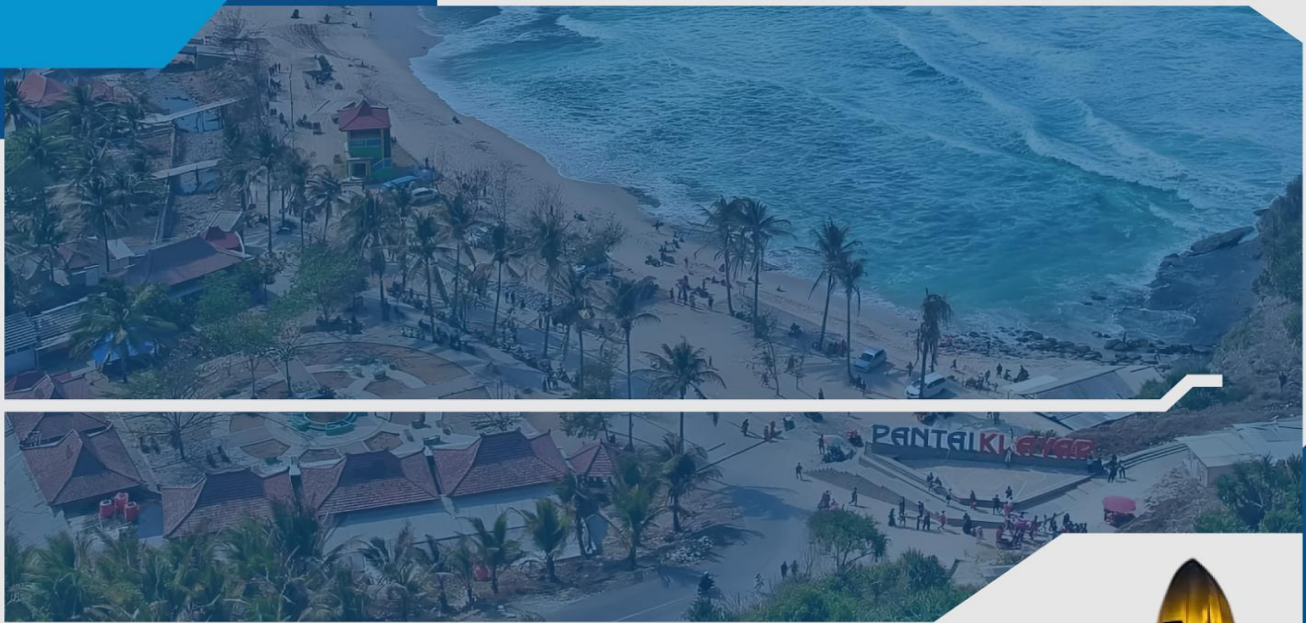




RENSTRA

**Dinas Komunikasi
dan Informatika
Kabupaten Pacitan
Tahun 2025–2029**





KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025–2029 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang mencakup periode lima tahun. Renstra ini disusun sebagai bentuk operasionalisasi visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah, yang berisi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025–2029, dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025–2029 juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika. Dokumen ini akan memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat tersebut. Proses penyusunannya dilakukan secara terkoordinasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait guna menjamin keterpaduan dan sinergi antar-perangkat daerah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini. Besar harapan kami, dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi alat pengendalian dan evaluasi atas kinerja pelayanan, serta mendorong tercapainya pelayanan publik yang



yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pacitan, 19 September 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika

Kabupaten Pacitan

Dodik Soemarsono, AP, M.Sc

NIP. 19761015 199602 1 002

Pembina Utama Muda





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL.....	V
DAFTAR GAMBAR.....	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	11
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika	17
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika	42
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	45
2.1.6 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah.....	46
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	55
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	55
2.2.2 Isu Strategis	58
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	69
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	69
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	80
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	90
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah.....	90



4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	137
BAB V PENUTUP		145
5.1	Kesimpulan.....	145
5.2	Kaidah Pelaksanaan	145
5.3	Pengendalian dan Evaluasi	146



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah SDM berdasarkan Jabatan.....	18
Tabel 2.2 Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah	20
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan	25
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan	40
Tabel 2.5 Kelompok Sasaran Layanan	42
Tabel 2.6 Mitra Perangkat Daerah	45
Tabel 2.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah	47
Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	56
Tabel 2.9 Perumusan Isu Perangkat Daerah.....	66
Tabel 3.1 Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan	73
Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Kab. Pacitan.....	79
Tabel 3.3 Penentuan Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika	80
Tabel 3.4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika.....	83
Tabel 3.5 Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	86
Tabel 3.6 Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Pacitan	88
Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.....	91
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan	103
Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	134
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	138
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	140



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.....	17
Gambar 2.2 Presentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi.....	28
Gambar 2.3 Prosentase Diseminasi dan Layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Informasi	29
Gambar 2.4 Prosentase Konten Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah dn Pemerintah Kab/Kota sesuai dengan Strategi Komunikasi	30
Gambar 2.5 Prosentase Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah Kab/Kota yang Menyebabkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah	31
Gambar 2.6 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	33
Gambar 2.7 Prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan Dinas Kominfo	34
Gambar 2.8 Prosentase layanan SPBE (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik.....	35
Gambar 2.9 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	36
Gambar 2.10 Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah.....	37
Gambar 3.1 Logical Framework Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.....	77
Gambar 3.2 Pohon Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menegaskan bahwa Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah untuk periode lima tahun.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2025–2029 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Proses penyusunan Renstra ini melalui beberapa tahapan, mulai dari persiapan, penyusunan rancangan awal (Ranwal), penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir (Rankhir), hingga penetapan dokumen Renstra. Renstra Diskominfo disusun sebagai dokumen perencanaan teknis-operasional yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pacitan, serta menjadi instrumen untuk menerjemahkan visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam langkah pembangunan yang sistematis, terukur, dan



akuntabel. Selain itu, Renstra ini juga menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, serta acuan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pada lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika. Lebih jauh, Renstra memiliki fungsi strategis dalam mengarahkan perangkat daerah agar mampu berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan secara sistematis melalui tahapan yang meliputi: persiapan, perumusan rancangan awal, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir, hingga penetapan dokumen Renstra. Seluruh proses disusun dengan mengacu pada ketentuan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Kepala Daerah tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat arah, tujuan, dan sasaran pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, sehingga penyusunannya harus selaras dengan visi, misi, dan target kepala daerah. Selain itu, penyusunan Renstra juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, RTRW, dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Renja OPD kemudian diturunkan setiap tahun dari Renstra untuk menetapkan program, kegiatan, dan anggaran yang menjadi bagian dari RKPD sekaligus dasar penyusunan APBD. Dengan demikian, terdapat konsistensi dan keterpaduan antar dokumen perencanaan yang memastikan pembangunan daerah



berjalan efektif, terarah, dan sesuai target pembangunan jangka menengah maupun tahunan.

Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Pacitan masih menghadapi sejumlah tantangan yang harus diatasi agar Renstra berjalan optimal. Implementasi SPBE belum sepenuhnya sesuai kaidah arsitektur yang ditetapkan, penyebaran informasi publik dan literasi digital masyarakat masih terbatas, serta kepedulian pemerintah terhadap keamanan data, informasi, dan komunikasi dari potensi akses ilegal maupun gangguan masih rendah. Selain itu, kualitas sumber daya manusia di bidang statistik maupun keamanan informasi belum memadai, ditambah rendahnya kesadaran dan pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap pentingnya pengelolaan informasi. Kondisi ini menegaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan perlu mengambil langkah strategis dalam memperkuat tata kelola informasi, meningkatkan kapasitas SDM, serta membangun kesadaran kolektif untuk mendukung transformasi digital yang lebih baik.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan regulasi sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi



Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025 – 2045;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029; dan
27. Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan Nomor 74 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 144



Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah guna menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah secara sistematis, terarah, terukur, dan akuntabel.

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi acuan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan serta perwujudan tujuan pembangunan daerah secara terencana dalam periode lima tahun;
2. Memberikan arah yang jelas untuk implementasi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Perangkat Daerah, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan;
3. Memberikan kerangka evaluatif berupa tolok ukur kinerja yang digunakan sebagai dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan Perangkat Daerah; dan
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah selama periode perencanaan,



sehingga terwujudnya keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat landasan konseptual dan normatif penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penjabaran dalam bab ini mencakup:

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi terkait gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang mencakup antara lain:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika;



- 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Pemberian Pelayanan (jika ada);
- 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika (jika ada); dan
- 2.1.7 Kerja Sama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika (jika ada).

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan
- 2.2.2 Isu Strategis.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan beserta indikator kinerja, strategi, dan arah kebijakan dalam lima tahun ke depan. Rincian subbab pada Bab III adalah sebagai berikut:

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah; dan
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Selain itu, dicantumkan pula indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan perangkat daerah. Adapun rincian subbabnya adalah:

- 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah; dan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan strategis dari keseluruhan dokumen Renstra, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme



pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan. Rincian subbab pada Bab V adalah sebagai berikut:

- 5.1 Kesimpulan;
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan;
- 5.3 Pengendalian dan Evaluasi.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan. Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang meliputi informasi dan komunikasi, teknologi informatika dan persandian, statistik, serta tugas pembantuan yang diberikan.

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas adalah:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi informasi dan komunikasi;
- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi teknologi informatika dan persandian;



- c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi statistik; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan peraturan tersebut, maka susunan organisasi kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan terdiri dari:

- a. Sekretariat, yang membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- b. Bidang Informasi dan Komunikasi, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Teknologi Informatika dan Persandian, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Bidang Statistik, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas pokok membantu bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian yang meliputi informasi dan komunikasi, teknologi informatika dan persandian, statistika serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika juga memiliki uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi informasi dan komunikasi;



- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi teknologi informatika dan persandian;
- c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi statistik; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, serta program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dalam melaksanakan tugas fungsi:

- a. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan;
- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugas:

1. Menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
2. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
3. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
4. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan
5. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
6. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi

Bidang Informasi dan Komunikasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Informasi dan Komunikasi melaksanakan Sebagian tugas Dinas yang meliputi pengelolaan informasi dan pengelolaan media komunikasi, serta kemitraan komunikasi publik. Bidang Informasi dan Komunikasi dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengelolaan informasi:



- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengelolaan media komunikasi;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan kemitraan komunikasi publik; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Informasi dan Komunikasi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Teknologi Informatika dan Persandian

Bidang Teknologi Informatika dan Persandian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Teknologi Informatika dan Persandian melaksanakan Sebagian tugas Dinas yang meliputi infrastruktur teknologi informatika, pengelolaan aplikasi dan persandian. Bidang Teknologi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pembangunan infrastruktur teknologi informatika;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengelolaan aplikasi;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi persandian; dan



- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Teknologi Informatika dan Persandian membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Statistik

Bidang Statistik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Statistik melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pendataan dan dokumentasi serta analisis data. Bidang Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas, dipimpin oleh Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pendataan dan dokumentasi;
- b. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan fasilitasi, koordinasi serta pemantauan analisa data;
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Statistik membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1.6 Kelompok Jabatan Fungsional

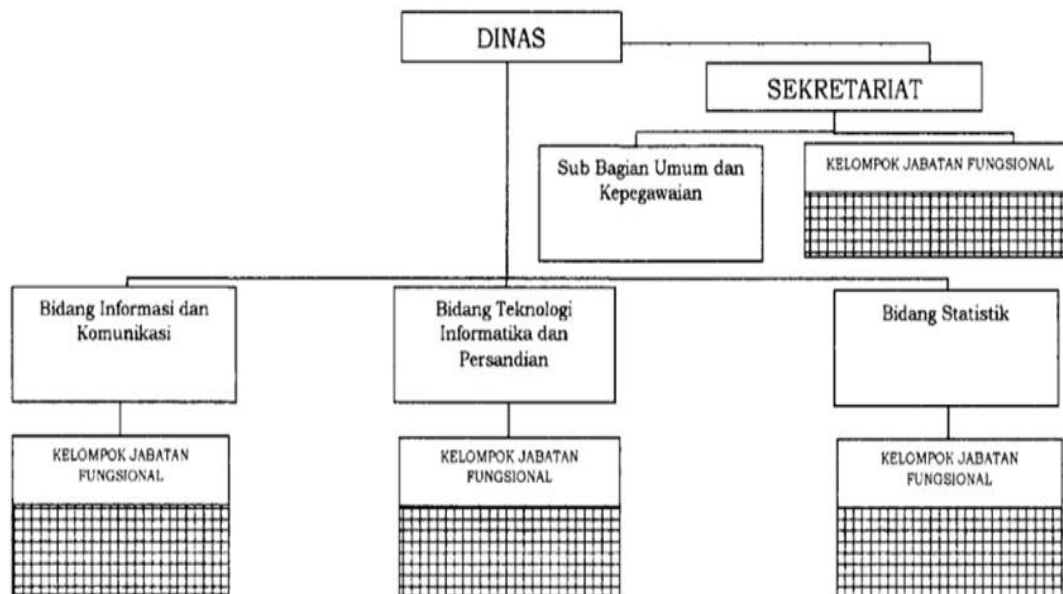
Pada masing-masing unit kerja dilingkungan Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. Kelompok



jabatan fungsional dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional. Jumlah tenaga fungsional ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan Nomor 74 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pacitan, disajikan pada bagan berikut:



Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika harus dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien, sehingga



memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya berperan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi perangkat daerah, yang mencakup sumber daya manusia dan aset/sarana prasarana. Dengan permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta adanya berbagai regulasi dari pemerintah, maka diperlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan program yang ditetapkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan menuntut dukungan sumber daya manusia yang memadai, kompeten, profesional dan berintegritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Saat ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan memiliki 52 pegawai. Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan jenjang jabatan struktural dan fungsional adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah SDM berdasarkan Jabatan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I			
2	Golongan II	1		1
3	Golongan III	7	5	12
4	Golongan IV	5	1	6
5	Tenaga Teknis	25	8	33
Jumlah		38	14	52

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan berada dalam kondisi **belum ideal**. Sehingga, ke depannya diperlukan langkah-langkah penguatan melalui pengisian jabatan



kosong, penataan ulang struktur jabatan, serta peningkatan kapasitas ASN guna mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara optimal.

Selain aspek jabatan, kondisi pegawai juga dapat dilihat dari tingkat kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Tingkat pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas individu pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin kompleks dan berbasis pengetahuan. Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 52 orang dapat dirincikan berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut:

1. Magister (S-2) : 8 Orang
2. Sarjana (S-1) : 21 Orang
3. Diploma 3 : 1 Orang
4. Diploma 2 : 9 Orang
5. SMA Sederajat : 13 Orang

Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang Strata 1 (S1), yang mencerminkan kesiapan dalam memenuhi tuntutan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Hal ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi peningkatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, serta pengembangan karier berbasis kualifikasi dan kebutuhan organisasi.

2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sarana pendukung pelaksanaan fungsi organisasi dapat dirincikan sebagai berikut.



Tabel 2.2 Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
1	Portable Generating Set	1		1
2	Station Wagon	3	1	4
3	Sepeda Motor	7	2	9
4	Tool Kit Set	1		1
5	Mesin Absen (Time Recorder)	1		1
6	Lemari Kayu	4		4
7	Rak Besi	2		2
8	Filing Cabinet Besi	3		3
9	Brankas	1		1
10	Lemari Kaca	7		7
11	CCTV - Camera Control Television	7		7
12	Alat Penghancur Kertas	2		2
13	Mesin Absensi	1		1
14	LCD Projector/Infocus	5		5
15	Lensa	3		3
16	Meja Kerja Kayu	7		7
17	Kursi Besi/Metal	1		1
18	Meja Rapat	3		3
19	Kursi Rapat	20		20
20	Kursi Tamu	1		1
21	Kursi Putar	9		9
22	Kursi Biasa	6		6
23	Sofa	1		1
24	Lemari Es	2		2
25	AC Split	16	1	17
26	Exhaust Fan	3		3
27	Rak Piring Aluminium	1		1
28	Televisi	5		5
29	Sound System	3		3
30	Microphone	2		2
31	Unit Power Supply	3		3
32	Stabilisator	1		1
33	Tangga Aluminium	1		1
34	Karpet	1		1
35	Lampu	1		1
36	Tempat Sampah	1		1



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
37	Power Distribution Unit (PDU)	1		1
38	Kabel Microphone	1		1
39	Meja Kerja Menteri/Gubernur/Kepala Dinas	1		1
40	Meja Kerja Pejabat Eselon II	3		3
41	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5		5
42	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1		1
43	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10		10
44	Meja Operator	1		1
45	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1		1
46	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2		2
47	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	7		7
48	Audio Mixing Console	1		1
49	Audio Amplifier	6		6
50	Audio Monitor Active	2		2
51	Telephone Hybrid	1		1
52	Intercom Unit	5		5
53	Microphone/Wireless MIC	6		6
54	Voice Recorder	3		3
55	Radio RIG	1		1
56	Layar Film/Projector	3		3
57	Camera Digital	9	1	10
58	Lampu Blitz Kamera	2		2
59	Lensa Filter	1		1
60	Video Conference	4		4
61	Video Router	1		1
62	LCD Monitor	2		2
63	Camera Conference	2		2
64	Drone	2		2
65	Web Cam	6		6
66	Camera Dry Box	1		1
67	Camera Stabilizer	2		2
68	Lampu Studio	2		2
69	Telescope	1		1



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
70	Tripod	2		2
71	HandyCam	2	1	3
72	Audio Control (Central Unit)	1		1
73	Headphone Distributor	2		2
74	Monopod	1		1
75	Wireless HDMI Kit	4		4
76	Kabel HDMI	10		10
77	Battery Drone	2		2
78	Telephone (PABX)	1		1
79	Handy Talky (HT)	11		11
80	Facsimile	1		1
81	Wireless Amplifier	1		1
82	Alat DF Radio SSB	1		1
83	Unit Pemancar VHF/FM	10		10
84	Antena VHF/FM Portable	4		4
85	Pemancar Radio	2		2
86	Menara Pemancar	13	1	14
87	Stabilizer/UPS	1		1
89	Mini Komputer	6	1	7
90	Local Area Network (LAN)	9		9
91	Internet	1		1
92	Fiber Optik	3		3
93	P.C Unit	12	2	14
94	Lap Top	12	1	13
95	Notebook	21		21
96	Tablet PC	3		3
97	P.C Monitor	1		1
98	Hard Disk	3		3
99	Motherboard	1		1
100	RAM	2		2
101	Speaker Komputer	5		5
102	Monitor	4		4
103	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15		15
104	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1		1
105	External/ Portable Hard Disk	2		2
106	HDMI Extender	3	1	4
107	HDMI Splitter	4		4



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
108	Server	12		12
109	Router	5		5
110	Hub	5		5
111	Repeater and Transceiver	1		1
112	Rak Server	1		1
113	Firewall	2		2
114	Access Point	49		49
115	Tenda	2		2
116	GPS Survey	1		1
117	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1		1
118	Bangunan Gedung Pendidikan	1		1
119	Instalasi Listrik Kantor	1		1

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, 2025

Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa sebagian sarana dan prasarana milik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, sebanyak 12 unit berada dalam kondisi tidak layak pakai. Hal ini disebabkan oleh kerusakan fisik, usia penggunaan yang telah melewati batas optimal, atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan operasional saat ini. Kondisi tersebut dapat berdampak pada menurunnya efektivitas layanan dan kinerja organisasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang mencakup pemeliharaan terhadap aset yang masih dapat digunakan, penghapusan aset yang tidak layak, serta pengadaan sarana dan prasarana baru secara bertahap untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara maksimal dalam lima tahun ke depan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan arah kebijakan yang dituangkan dalam



Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat serta Bidang-bidang terkait, dengan dukungan pendanaan melalui program dan kegiatan yang tersedia. Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan pada tabel berikut:



**Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pacitan**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Hasil nilai Evaluasi SAKIP PD			√	> B	> B	76,06	76,46	77,6	> B	> B	70,4	73,5	72,3			92,56 %	96,13 %	93,17%
2	Presentase layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		√				58.06	64.52	87.5			50	87.5	87.5			86,12 %	135,62 %	100,00 %
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota		√				65	70	75			81.03	111	97.87			124,66 %	158,57 %	130,49 %
4	Prosentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP		√				50	51	83			89.17	120.5	100			178,34 %	236,27 %	120,48 %
5	Prosentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota sesuai dengan strategi		√				100	100	100			109.4	187,,80	100			109,40 %	187,80 %	100,00 %



	komunikasi (STRAKOM)																	
6	Prosentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah	√				44	54	64			44.52	91.83	88.88			101,18 %	170,06 %	138,88 %
7	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	√				44	50	60			35,89	41.02	43.58			81,57 %	82,04 %	68,37%
8	Prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan, yang disediakan oleh Dinas Kominfo	√				25.81	45.16	64.2			25,,81	25,,81	41.02			79,47 %	45,42 %	63,89%
9	Prosentase layanan SPBE (layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	√				6.25	12.5	25			6.25	12.05	25			100,00 %	96,40 %	100,00 %



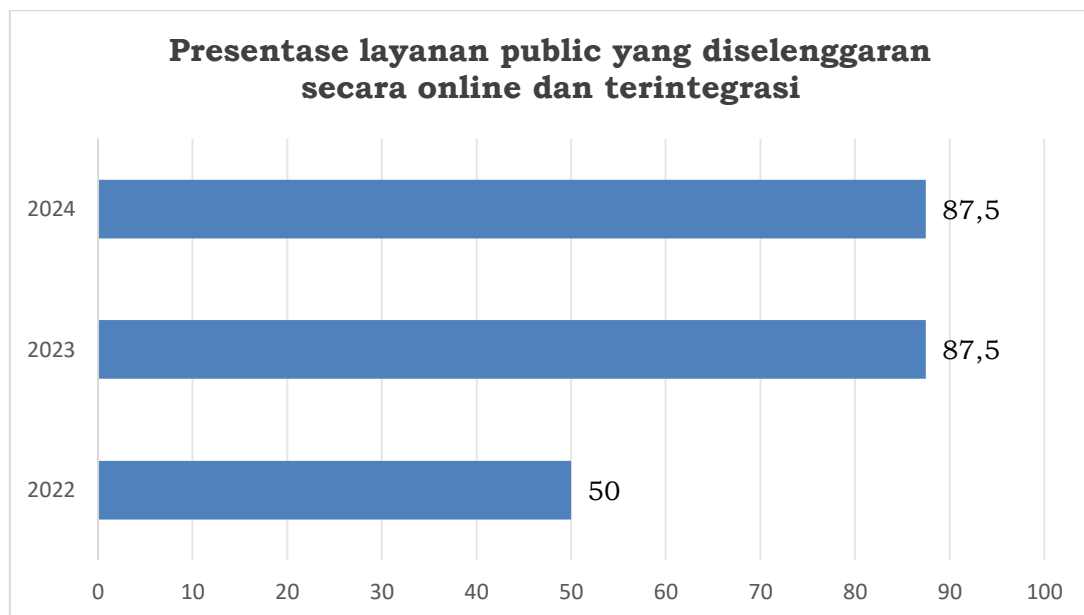
10	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		√				100	100	100				100	100	100			100,00 %	100,00 %	100,00 %
11	Tingkat keamanan informasi pemerintah		√				16	33	49				18,75	18,75	49			117,25 %		100,00 %
12	Hasil nilai IKM PD			√			85,82	86,23	86,63				85,98	85,11	84,34			100,19 %	98,70 %	97,36%
13	Indeks SPBE						1,85	1,9	3,5	1,78	1,41		2,34	3,34	3,5			126,49 %	175,79 %	100,00 %

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, 2025



Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan menunjukkan perkembangan positif dalam layanan publik berbasis digital dan diseminasi informasi pemerintah daerah, dengan beberapa indikator melampaui target seperti layanan publik online yang konsisten 100% serta strategi komunikasi pemerintah yang melebihi 200% pada 2022–2023. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen pimpinan daerah, regulasi nasional, kesiapan SDM, dan kerjasama lintas perangkat daerah. Namun, masih ada tantangan pada aspek infrastruktur jaringan, keamanan informasi, dan kualitas tata kelola data yang belum optimal, sehingga diperlukan penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan layanan digital semakin efektif ke depan.

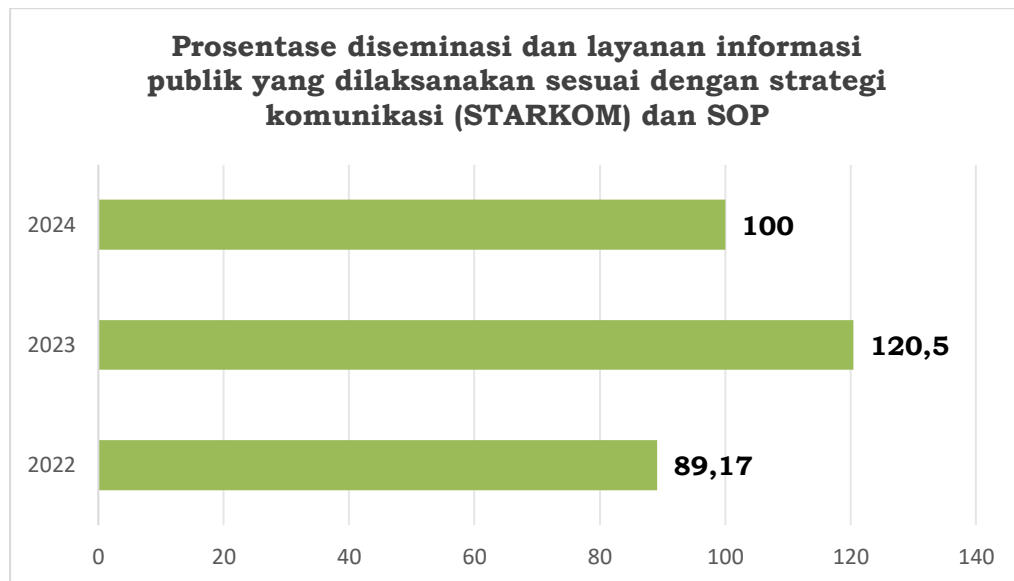
Berikut capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan :



Gambar 2.2 Presentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi



Grafik di atas menunjukkan perkembangan presentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi. Pada tahun 2022 capaian masih relatif rendah, yaitu sebesar 50%, namun pada tahun 2023 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 87,5% dan angka tersebut berhasil dipertahankan pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan yang konsisten dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik, sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi layanan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.

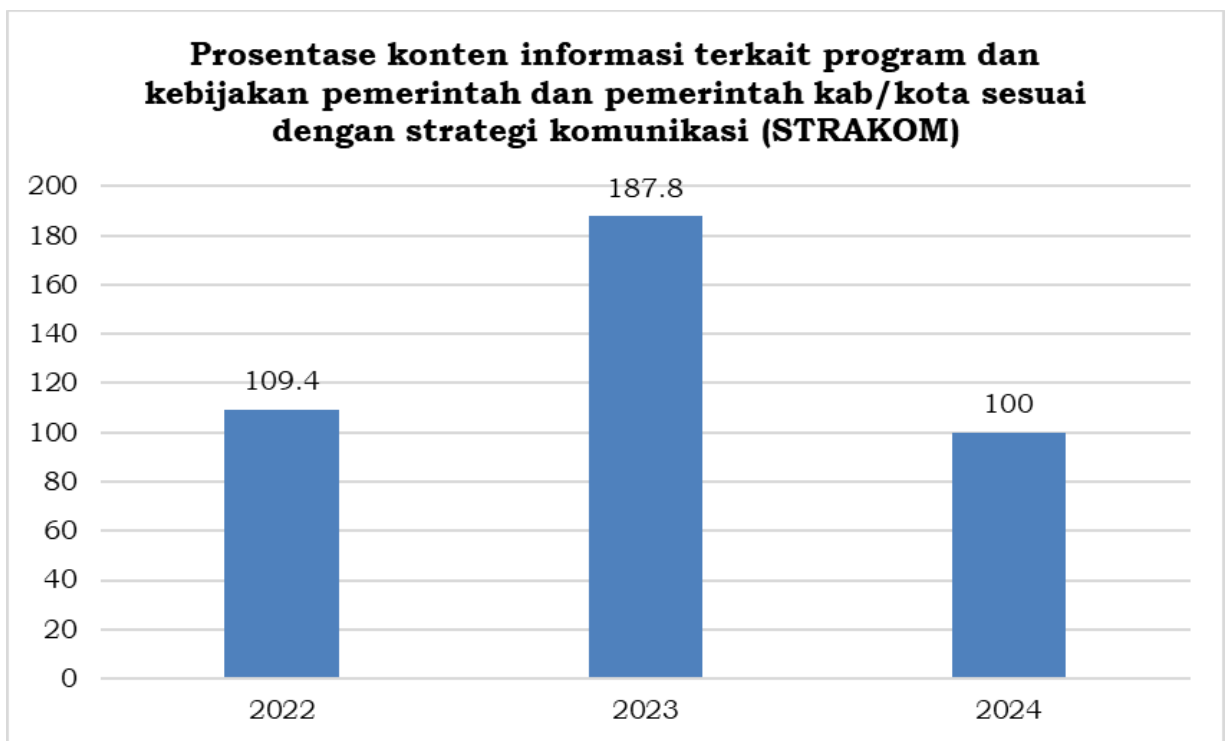


Gambar 2.3 Prosentase Diseminasi dan Layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Informasi

Grafik menunjukkan perkembangan prosentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP pada tahun 2022–2024. Pada tahun 2022 capaian tercatat sebesar 89,17%, kemudian meningkat signifikan



pada tahun 2023 hingga mencapai 120,5%, sebelum akhirnya stabil di angka 100% pada tahun 2024. Capaian ini menggambarkan adanya peningkatan kualitas pelaksanaan strategi komunikasi pemerintah dalam mendiseminasikan informasi publik, sekaligus menunjukkan bahwa standar layanan informasi mulai terjaga konsistensinya pada akhir periode.

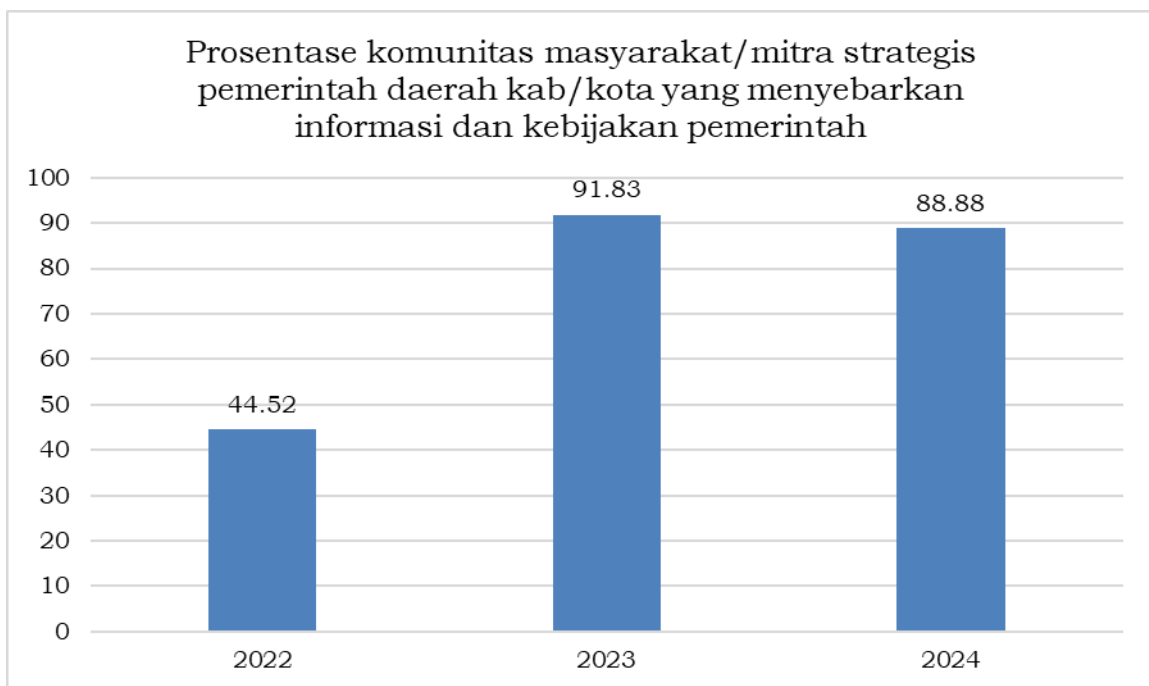


Gambar 2.4 Prosentase Konten Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah dn Pemerintah Kab/Kota sesuai dengan Strategi Komunikasi

Realisasi pencapaian Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyebaran konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) menunjukkan kinerja yang cukup baik meskipun fluktuatif. Pada tahun 2022 capaian tercatat sebesar 109,4%,



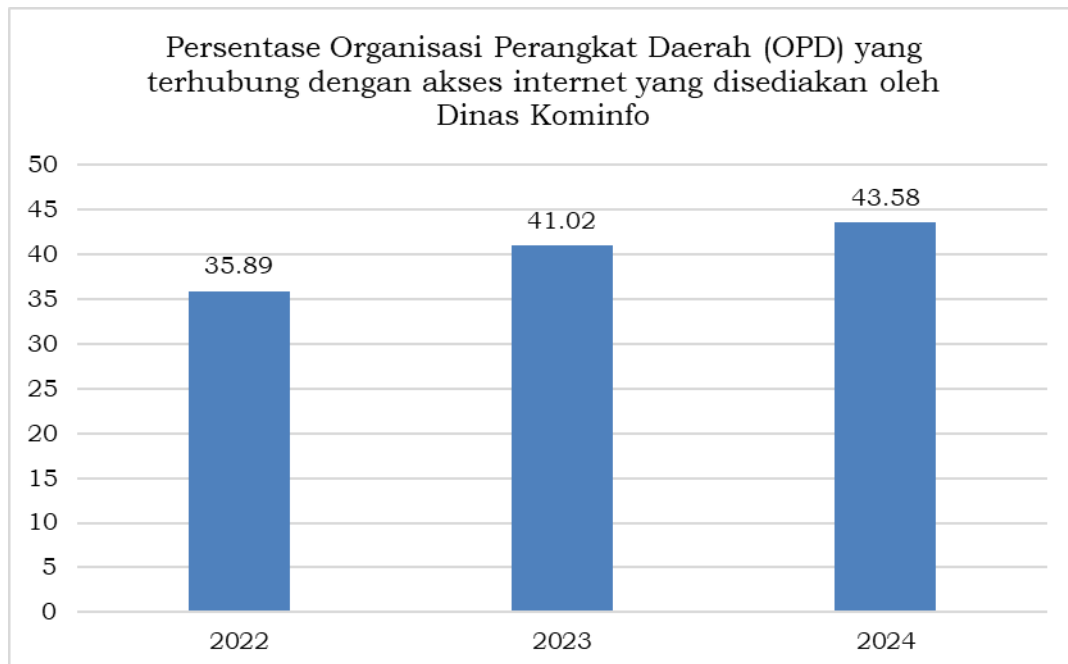
meningkat tajam pada 2023 hingga mencapai 187,8%, sebelum menurun kembali menjadi 100% pada 2024 yang berarti sesuai dengan target. Capaian ini didukung oleh beberapa faktor penting, antara lain komitmen pemerintah daerah dalam mendorong keterbukaan informasi publik, pemanfaatan teknologi informasi dan media digital yang semakin luas, kolaborasi lintas perangkat daerah dalam penyediaan data, dukungan regulasi nasional maupun daerah terkait SPBE dan layanan informasi publik, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi. Selain itu, kesiapan SDM Dinas Kominfo yang adaptif dalam mengelola platform komunikasi juga turut memperkuat keberhasilan capaian tersebut.



Gambar 2.5 Prosentase Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah Kab/Kota yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah



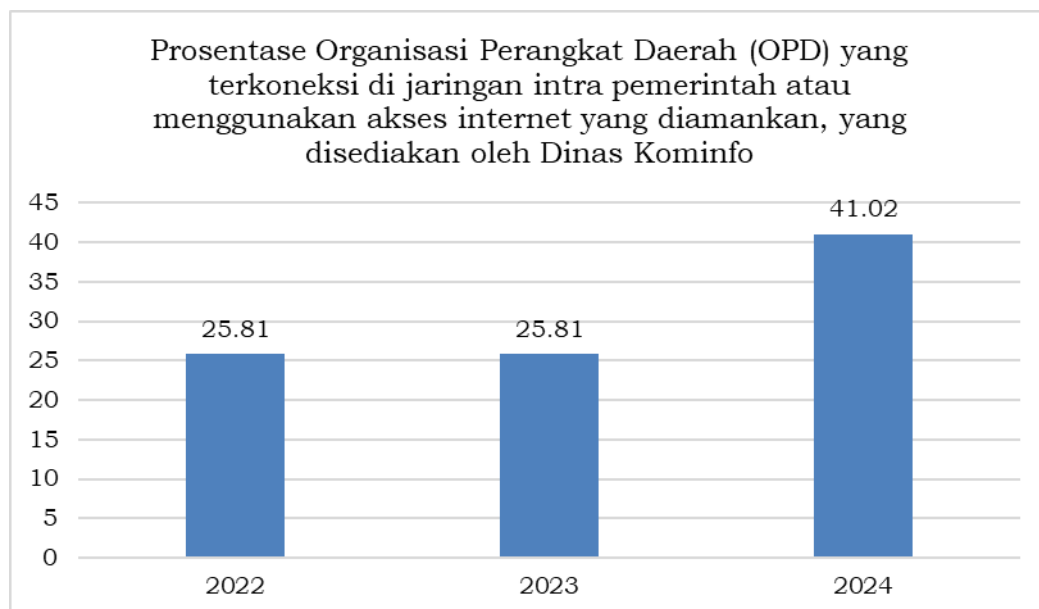
Realisasi pencapaian prosentase komunitas masyarakat atau mitra strategis pemerintah daerah yang berperan dalam menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah menunjukkan peningkatan signifikan selama periode 2022–2024. Pada tahun 2022 capaian masih relatif rendah yakni sebesar 44,52%, namun meningkat pesat pada 2023 hingga mencapai 91,83% dan sedikit menurun pada 2024 menjadi 88,88% yang tetap berada pada level tinggi. Peningkatan ini didukung oleh penguatan peran komunitas informasi masyarakat (KIM), optimalisasi kerja sama dengan mitra strategis, serta adanya dukungan regulasi yang memperkuat partisipasi masyarakat dalam diseminasi informasi. Selain itu, pemanfaatan media digital yang semakin luas dan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam penyebaran informasi turut menjadi faktor penting yang mendorong keberhasilan capaian tersebut.





Gambar 2.6 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo

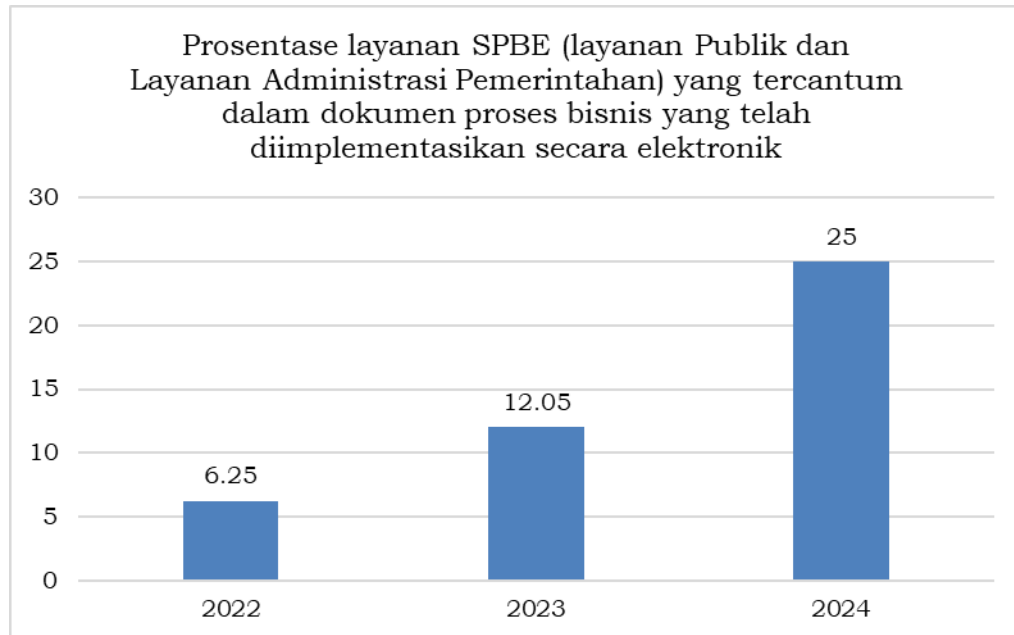
Realisasi pencapaian Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan tren positif dalam meningkatkan persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan, yakni dari 35,89% pada tahun 2022 menjadi 41,02% pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 43,58% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya komitmen dinas dalam memperluas infrastruktur jaringan, memperkuat layanan internet, serta memastikan ketersediaan akses yang lebih merata. Faktor yang mendukung pencapaian ini antara lain pengembangan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan jaringan, adanya kebijakan yang mendorong digitalisasi layanan pemerintahan, serta kerja sama dengan penyedia layanan teknologi untuk memperkuat kualitas konektivitas..





Gambar 2.7 Prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan Dinas Kominfo

Realisasi pencapaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pacitan dalam meningkatkan persentase OPD yang terkoneksi dengan jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan menunjukkan perkembangan signifikan. Pada tahun 2022 dan 2023 capaian masih stagnan di angka 25,81%, namun pada tahun 2024 terjadi lonjakan menjadi 41,02%. Hal ini mencerminkan adanya upaya percepatan integrasi jaringan yang lebih terarah dan fokus pada peningkatan keamanan serta keandalan akses internet di lingkungan OPD. Faktor yang mendukung pencapaian ini antara lain penguatan infrastruktur jaringan aman, dorongan implementasi kebijakan keamanan informasi, peningkatan kesadaran OPD terhadap pentingnya perlindungan data pemerintah, serta adanya investasi teknologi untuk menjaga keberlangsungan sistem komunikasi yang lebih terpercaya.

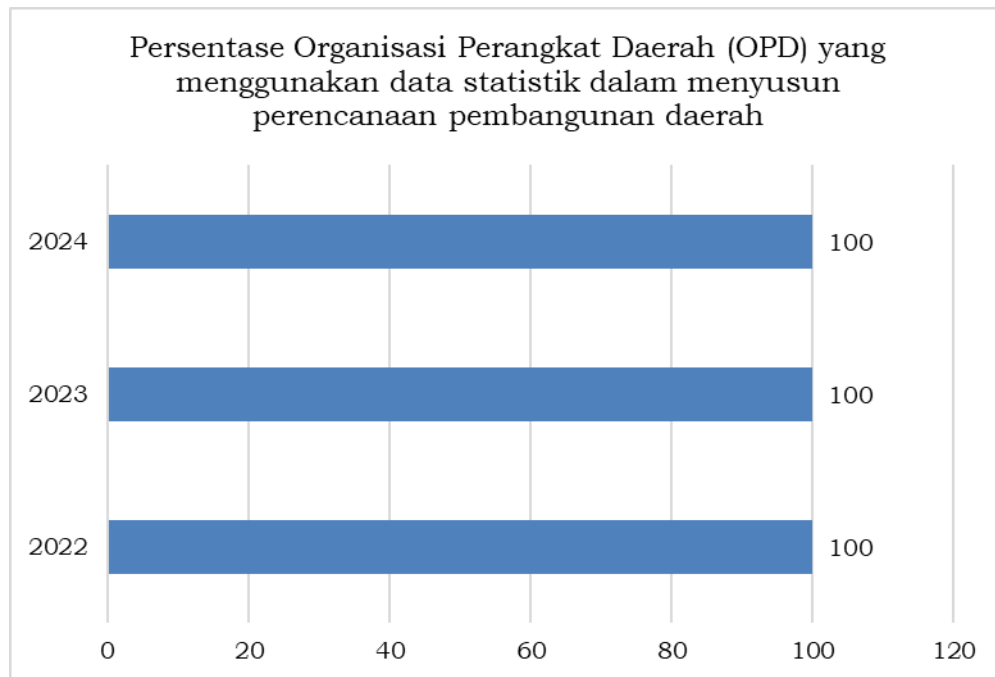


Gambar 2.8 Prosentase layanan SPBE (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik

Grafik menunjukkan peningkatan signifikan dalam implementasi layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), baik layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan, yang tercantum dalam dokumen proses bisnis. Pada tahun 2022, capaian baru mencapai 6,25%, kemudian naik menjadi 12,05% pada tahun 2023, dan meningkat pesat hingga 25% pada tahun 2024. Tren positif ini mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital, mendorong efisiensi layanan publik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Peningkatan tersebut juga didukung oleh penguatan regulasi,

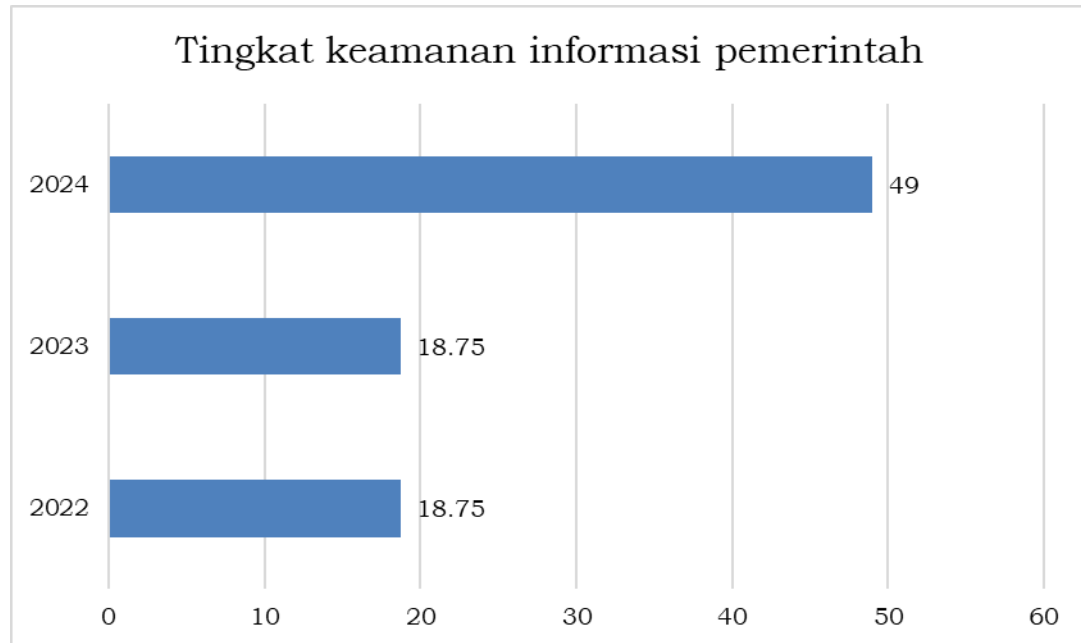


pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi sistem layanan elektronik yang semakin prim.



Gambar 2.9 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah

Grafik menunjukkan bahwa persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah mencapai tingkat maksimal, yaitu 100%, selama tiga tahun berturut-turut: 2022, 2023, dan 2024. Capaian ini mengindikasikan bahwa seluruh OPD telah menerapkan prinsip perencanaan berbasis data (evidence-based planning), yang merupakan fondasi penting dalam pengambilan keputusan yang akurat, terukur, dan efektif untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan tepat sasaran.



Gambar 2.10 Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

Grafik menunjukkan peningkatan signifikan dalam implementasi layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), baik layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan, yang tercantum dalam dokumen proses bisnis. Pada tahun 2022, capaian baru mencapai 6,25%, kemudian naik menjadi 12,05% pada tahun 2023, dan meningkat pesat hingga 25% pada tahun 2024. Tren positif ini mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital, mendorong efisiensi layanan publik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Peningkatan tersebut juga didukung oleh penguatan regulasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi sistem layanan elektronik yang semakin prima.

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan menunjukkan perkembangan positif, khususnya pada aspek



layanan publik berbasis digital dan diseminasi informasi pemerintah daerah. Beberapa indikator bahkan melampaui target, seperti layanan publik online dan terintegrasi yang konsisten mencapai 100%, serta pelaksanaan strategi komunikasi pemerintah (STRAKOM dan STARKOM) yang berhasil melebihi target dengan capaian hingga di atas 200% pada tahun 2022–2023. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari komitmen pimpinan daerah dalam mendorong digitalisasi pelayanan publik, dukungan regulasi nasional, kesiapan sumber daya manusia, serta kerjasama lintas perangkat daerah dalam mendukung keterbukaan informasi dan pemanfaatan data statistik untuk perencanaan pembangunan.

Namun demikian, masih terdapat indikator yang belum mencapai target secara optimal, terutama yang terkait dengan ketersediaan infrastruktur dan keamanan informasi. Akses internet yang disediakan Dinas Kominfo serta konektivitas jaringan intra pemerintah masih rendah, dengan capaian rata-rata di bawah 70% dari target. Demikian pula tingkat keamanan informasi pemerintah dan indeks SPBE, meskipun mengalami peningkatan, belum sepenuhnya sesuai harapan. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur jaringan, kebutuhan peningkatan kualitas tata kelola data, serta dukungan dari aktor eksternal seperti penyedia layanan internet. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi antara Dinas Kominfo, perangkat daerah lain, pemerintah pusat, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan pengelolaan informasi dan layanan digital daerah dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang.

Selanjutnya, analisis capaian kinerja perlu dikaitkan dengan tingkat realisasi anggaran sebagai salah satu indikator efisiensi



pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi anggaran selama periode tahun 2020–2024 mencerminkan sejauh mana alokasi sumber daya (*input*) telah dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan luaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan target kinerja. Adapun rincian realisasi anggaran dapat disajikan sebagai berikut:



Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp366.555.839	Rp752.850.000	Rp1.179.419.420	Rp872.868.000	Rp887.000.000	Rp363.149.139	Rp716.965.813	Rp1.172.703.495	Rp858.466.995	Rp881.313.951	99,07%	95,23%	99,43%	98,35%	99,36%
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp1.341.869.550	Rp1.260.266.000	Rp1.400.746.400	Rp1.533.455.000	Rp1.467.866.500	Rp1.324.425.167	Rp1.259.273.000	Rp1.392.820.632	Rp1.518.270.231	Rp1.451.808.576	98,70%	99,92%	99,43%	99,01%	98,91%
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp123.262.600	Rp114.200.000	Rp272.500.000	Rp302.725.000	Rp330.000.000	Rp122.692.600	Rp113.916.000	Rp271.391.650	Rp299.028.350	Rp328.765.050	99,54%	99,75%	99,59%	98,78%	99,63%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp10.330.000	Rp3.000.000	Rp10.340.000	Rp5.000.000	Rp6.642.000	Rp9.823.000	Rp1.009.000	Rp10.207.000	Rp4.958.000	Rp6.341.200	95,09%	33,63%	98,71%	99,16%	95,47%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp748.969.925	Rp2.842.989.070	Rp3.162.261.282	Rp3.626.057.125	Rp4.451.860.017	Rp729.653.107	Rp2.773.592.654	Rp3.088.241.224	Rp3.506.110.292	Rp4.264.072.919	97,42%	97,56%	97,66%	96,69%	95,78%
TOTAL	Rp2.590.987.914	Rp4.973.305.070	Rp6.025.267.102	Rp6.340.105.125	Rp7.143.368.517	Rp2.549.743.013	Rp4.864.756.467	Rp5.935.364.001	Rp6.186.833.868	Rp6.932.301.696	0,984	0,978	0,985	0,976	0,970

Sumber: Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika



Kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah (PD) sangat dipengaruhi oleh prosedur dan mekanisme perencanaan anggaran yang telah disusun secara sistematis. Hal ini tercermin dari Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik serta Program Aplikasi Informatika, di mana meskipun terjadi fluktuasi pada besaran anggaran setiap tahunnya, rasio realisasi terhadap anggaran tetap berada di atas 98%. Kondisi ini menandakan bahwa prosedur perencanaan dan pelaksanaan telah berjalan efektif, mampu menyesuaikan kebutuhan dengan alokasi yang tersedia, serta mendukung pencapaian target secara konsisten.

Selain prosedur, faktor jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) turut memberikan pengaruh signifikan. Pada Program Aplikasi Informatika dan Program Statistik Sektor, capaian realisasi yang tinggi menunjukkan adanya tenaga kerja yang kompeten dan mampu mengelola program berbasis digital dengan baik. Sebaliknya, capaian Program Persandian sempat menurun drastis pada 2021 hingga hanya mencapai 33,63% akibat terbatasnya SDM dan adanya alih fokus penugasan selama masa pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan SDM yang memadai, baik dari segi jumlah maupun keahlian, sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program.

Faktor lain yang juga memengaruhi adalah dukungan infrastruktur teknologi serta kebijakan pemerintah daerah. Program Aplikasi Informatika berhasil menjaga rasio realisasi di atas 98% berkat dukungan infrastruktur digital yang kuat sebagai penopang transformasi layanan publik. Sementara itu, alokasi anggaran yang konsisten untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran operasional administratif Diskominfo.



Dukungan kebijakan yang tepat, infrastruktur yang memadai, serta manajemen anggaran yang baik secara keseluruhan menjadi faktor kunci yang mendorong kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan PD tetap optimal.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika

Kelompok sasaran pelayanan merupakan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, serta aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan.

Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan selama periode perencanaan strategis.

Tabel 2.5 Kelompok Sasaran Layanan

NO	BIDANG	JENIS LAYANAN	KELOMPOK SASARAN
1	Bidang Informasi dan Komunikasi	pelayanan informasi di badan publik (PPID)	Seluruh Masyarakat (Pemohon Informasi)
		layanan terkait aduan masyarakat (SP4N lapor	Seluruh Masyarakat



		Layanan Pembuatan Surat Keterangan Kehilangan (Radio LPPL RSP)	Seluruh Masyarakat
2	Bidang TI dan persandian	Layanan jaringan intra antar OPD	Instansi Pemerintah (OPD)
		Layanan ruang penyimpanan data dan aplikasi	Instansi Pemerintah (OPD) dan desa
		Layanan Domain	Instansi Pemerintah (OPD) dan Desa
		Layanan TTE (Tanda Tangan Elektronik)	Instansi Pemerintah (OPD) dan Desa
		Layanan Keamanan Informasi	Instansi Pemerintah (OPD) dan Desa
3	Bidang Statistik	Pemberian informasi data statistik sektoral	Instansi Pemerintah (OPD) dan masyarakat umum
		Pembinaan kegiatan statistik sektoral	Instansi Pemerintah (OPD) dan masyarakat umum

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, 2025

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang **transparan**, **efisien**, dan **berbasis teknologi**, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan menyediakan berbagai jenis layanan yang terbagi ke dalam tiga bidang utama, yaitu **Informasi dan Komunikasi**, **Teknologi Informasi dan Persandian**, serta **Statistik**. Setiap layanan dirancang untuk menjawab kebutuhan informasi, komunikasi, serta pengelolaan data, baik bagi masyarakat umum maupun instansi



pemerintah. Pada **Bidang Informasi dan Komunikasi**, tersedia layanan **Pelayanan Informasi di Badan Publik (PPID)** yang terbuka bagi seluruh masyarakat sebagai pemohon informasi, serta layanan **penanganan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor**. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses **layanan pembuatan surat keterangan kehilangan** melalui media penyiaran lokal, seperti **Radio LPPL RSP**.

Sementara itu, **Bidang Teknologi Informasi dan Persandian** berperan penting dalam mendukung transformasi digital di lingkungan pemerintahan. Layanan yang disediakan mencakup **jaringan intra antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**, **penyediaan ruang penyimpanan data dan aplikasi**, serta **layanan domain** yang diperuntukkan bagi OPD dan desa. Tak kalah penting, tersedia pula **layanan Tanda Tangan Elektronik (TTE)** dan **layanan keamanan informasi** yang mendukung integritas serta perlindungan data pemerintahan. Di sisi lain, **Bidang Statistik** turut berkontribusi dalam penyediaan data yang akurat dan relevan melalui layanan **informasi statistik sektoral** dan **pembinaan kegiatan statistik sektoral**. Layanan ini ditujukan bagi instansi pemerintah maupun masyarakat umum untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan yang berbasis data.

Tabel yang disajikan di atas menggambarkan kelompok sasaran utama dalam penyelenggaraan pelayanan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan pada periode ini. Setiap kelompok sasaran memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, yang mempengaruhi desain serta implementasi layanan yang diberikan. Penyusunan dan penetapan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan dapat tepat sasaran dan



memberikan dampak yang maksimal. Dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menyusun strategi yang lebih terarah dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan penyesuaian kebijakan dan program yang lebih tepat guna, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai secara optimal.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Berikut ini adalah rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika:

Tabel 2.6 Mitra Perangkat Daerah

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
1	Seluruh OPD	Pembinaan kegiatan statistik sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral dalam rangka penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
2	Seluruh OPD	pelayanan informasi di badan publik (PPID)	Menjawab, mengklarifikasi dan menindaklanjuti terkait permohonan Informasi Publik
3	Seluruh OPD	layanan terkait aduan masyarakat (SP4N lapor)	Menjawab, mengklarifikasi dan menindaklanjuti terkait aduan melalui aplikasi SP4N Lapor
4	Seluruh OPD	Layanan jaringan intra antar OPD	Pemanfaatan layanan jaringan intra untuk layanan publik masing-masing OPD



No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
5	Seluruh OPD	Layanan ruang penyimpanan data dan aplikasi	Pemanfaatan ruang penyimpanan data secara elektronik
6	Seluruh OPD	Layanan Domain	kemudahan dan Keterbukaan akses informasi OPD
7	Seluruh OPD	Layanan TTE (Tanda Tangan Elektronik)	Menjamin Informasi yang ditandatangani tidak diubah atau dipalsukan setelah ditandatangani
8	Seluruh OPD	Layanan Keamanan Informasi	Mendeteksi dan memantau pergerakan potensi ancaman dan insiden keamanan informasi
9	BPS	Pemberian informasi data statistik	Pembina data Statistik daerah Informasi Statistik kabupaten dalam angka

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, 2025

Mitra-mitra yang tercantum dalam tabel ini memiliki peran penting dalam memperkuat penyelenggaraan pelayanan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Kolaborasi yang terjalin antara perangkat daerah dengan mitra ini menunjukkan adanya sinergi yang mendukung pencapaian tujuan bersama, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan mampu tercipta pelayanan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.1.6 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerja sama daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan memiliki tanggung jawab strategis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi setiap kerja sama yang dilakukan, baik antar daerah maupun dengan pihak ketiga. Kerja



sama ini harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan bertugas untuk memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama yang dijalin dapat mendukung tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Identifikasi terhadap jenis kerja sama yang telah dilakukan dan evaluasi pelaksanaannya sangat diperlukan untuk menilai efektivitas serta keberlanjutan dari kerja sama tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kerja sama yang dilakukan memberikan manfaat yang optimal bagi daerah dan masyarakat, serta memastikan kesesuaiannya dengan rencana pembangunan daerah yang ada.

Tabel 2.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

No	Mitra Kerjasama	Jenis Kerjasama	Dukungan Terhadap Kinerja
1	Jarrak Pos	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
2	Tribunjatim Network	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
3	Suara Jatim	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
4	Times Indonesia	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
5	Radar Madiun	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan



No	Mitra Kerjasama	Jenis Kerjasama	Dukungan Terhadap Kinerja
		Kabupaten Pacitan	
6	JTV Pacitan	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
7	Pacitanku.com	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
8	Warta Kita	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
9	Kanalindonesia.com	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
10	TVRI	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
11	TV One	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
12	Grindulu FM	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
13	Jatimnesia.com	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan



No	Mitra Kerjasama	Jenis Kerjasama	Dukungan Terhadap Kinerja
14	Radar Merah putih	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
15	Berita Gresik	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
16	Madiun Raya	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
17	Kabar Indonesia	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
18	Indopers. net	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
19	Jejak kasus TV	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
20	Terasjatim. com	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
21	Times News	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
22	Lingkar 7	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan



No	Mitra Kerjasama	Jenis Kerjasama	Dukungan Terhadap Kinerja
		Kabupaten Pacitan	
23	Cakrawala8.com	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
24	Pewarta	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
25	Arah Net	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
26	Detik Jurnal	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
27	Lintas Nasional 99	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
28	Lensa Pacitan	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
29	Lintas7. Net	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
30	Info Cegatan Pacitan	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan



No	Mitra Kerjasama	Jenis Kerjasama	Dukungan Terhadap Kinerja
31	Info Warta Pacitan	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarkan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
32	Pacitan Paradise	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarkan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
33	My Pacitan	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarkan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
34	Pacitan Update	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarkan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
35	Pacitanku	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarkan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
36	Pacitan Vision	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarkan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
37	Telegraf News	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarkan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
38	Jawa Pos	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarkan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
39	Kabarjatimnews	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarkan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan



No	Mitra Kerjasama	Jenis Kerjasama	Dukungan Terhadap Kinerja
		Kabupaten Pacitan	
40	Finews	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
41	Ketik. co.id	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
42	Gadjahmadane ws. com	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
43	Media Suara Mabas	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
44	Berita Patroli	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
45	Times Indonesia	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
46	Lidik Investigasi	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
47	Teropong Nusa	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan



No	Mitra Kerjasama	Jenis Kerjasama	Dukungan Terhadap Kinerja
48	Krimsus	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
49	Pacitan Update	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
50	Medianed.Indonesia	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
51	Suara Media Nasional	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
52	Fakta News 24	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
53	<u>Beritaidn.id</u>	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
54	Media Karya	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
55	Global Indo	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
56	Prabangkara	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan



No	Mitra Kerjasama	Jenis Kerjasama	Dukungan Terhadap Kinerja
		Kabupaten Pacitan	
57	Garda <u>Jatim.com</u>	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
58	Berita <u>Pacitan.com</u>	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
59	Lensa Nasional.com	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
60	Nusantara Pos	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
61	Lingkar Indonesia	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
62	Netizen Word	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
63	Pacitan Pos	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
64	Detik Nasional	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarluaskan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan



No	Mitra Kerjasama	Jenis Kerjasama	Dukungan Terhadap Kinerja
65	Dagelan Pacitan	Tim Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Menyebarkan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
66	Badan Pusat Statistik (BPS)	Pembina Data Statistik	Penyedia data statistik dasar dan pembinaan kegiatan statistik sektoral

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, 2025

Kerjasama daerah yang tercantum dalam tabel ini memainkan peran penting dalam mendukung kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kerjasama ini memungkinkan PD untuk memperluas kapasitas dan cakupan layanan yang diberikan, baik melalui penyediaan sumber daya, pembagian tanggung jawab, maupun koordinasi dalam pelaksanaan program-program prioritas. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja lebih efektif, mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta memaksimalkan pencapaian hasil yang diinginkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk



merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi & komunikasi yang kurang maksimal	Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum sesuai dengan kaidah arsitektur SPBE	• Rendahnya pengetahuan tentang Proses Bisnis dalam arsitektur SPBE • Belum terdokumentasi dengan baik penyelenggaraan SPBE di tingkat Perangkat Daerah • Infrastruktur Teknologi Informatika masih kurang optimal • Mahalnya sumberdaya dan Infrastruktur TI untuk mendukung layanan publik
		Penyebaran informasi publik dan literasi digital masyarakat belum optimal	• Masih rendahnya literasi digital pada masyarakat • Belum optimalnya pemanfaatan media komunikasi dalam penyebaran



No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			informasi
2	Belum optimalnya Penyelenggaraan dan Pembangunan Statistik Sektoral	Rendahnya kepedulian pemerintah terhadap Keamanan data, Informasi dan Komunikasi dari akses dan gangguan	• Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi SDI • Pelaksanaan kegiatan statistik sektoral masih banyak yang belum mendapatkan rekomendasi dari BPS
		Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia Statistik	• Rendahnya pemahaman dan kepedulian Perangkat Daerah terhadap pengelolaan data dan tata tertib data • Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM Statistisi
3	Penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan pemerintah belum optimal	Kesadaran dan pemahaman OPD terhadap informasi yang masih kurang	• Kurangnya kesadaran OPD akan pentingnya data dan keamanan informasi • Belum optimalnya edukasi terhadap penyelenggara keamanan di OPD
		Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia keamanan	• Belum optimalnya kualitas SDM



No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		informasi	dalam pengelolaan keamanan informasi
4	Tata kelola penunjang urusan pemerintahan yang perlu ditingkatkan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP tahun 2024 sebesar 72,30 (turun dari tahun 2023 sebesar 73,50)	• Kinerja belum terdokumentasikan dengan baik • Pimpinan tidak selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam pengukuran capaian kinerja • Penyajian analisa atas penyebab target kinerja tidak tercapai serta upaya untuk peningkatan kinerja yang dituangkan dalam

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan. Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena



dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Penentuan isu strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika didasarkan pada Potensi dan Permasalahan, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, KLHS RPJMD, dan RPJMD Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

2.2.2.1 Isu Global

Isu global merujuk pada kondisi, tren, atau tantangan yang bersifat lintas negara dan dapat mempengaruhi negara serta daerah. Isu ini mencakup perubahan iklim, krisis ekonomi global, pandemi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik internasional yang mempengaruhi perekonomian, lingkungan, dan kehidupan masyarakat di tingkat daerah. Isu global yang berdasarkan SDG's relevan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat ketimpangan akses terhadap internet dan teknologi informasi, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang menghambat pemerataan pembangunan digital dan literasi informasi.
2. Tingkat literasi digital yang rendah pada berbagai lapisan masyarakat menyebabkan rendahnya partisipasi dan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, ekonomi, dan layanan publik.
3. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi masih belum merata, khususnya jaringan internet cepat dan pusat data yang mendukung layanan pemerintahan digital dan ekonomi digital



4. Data sektoral dan statistik belum dikelola secara terbuka dan terintegrasi, sehingga menghambat pengambilan kebijakan yang berbasis data dan kolaborasi lintas sektor

2.2.2.2 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian dilakukan sebagai bagian dari upaya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah sejalan dengan prioritas nasional serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan secara makro. Melalui telaahan ini, perangkat daerah dapat mengidentifikasi keterkaitan program sektoral pusat yang relevan, sekaligus merumuskan langkah kolaboratif untuk memperkuat implementasi kebijakan di tingkat daerah. Berikut ini adalah isu strategis Kementerian Komunikasi dan Digital yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika:

1. Penetrasi perangkat TIK, khususnya untuk mendukung kegiatan produktif (tablet, komputer, laptop) masih rendah.
2. Konten digital yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat, seperti penyebaran informasi yang salah, konten yang merugikan, atau perpecahan social.
3. Kanal informasi pemerintah masih dinilai kurang andal dan terkini dikarenakan kurangnya integrasi platform informasi publik

2.2.2.3 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Telaahan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi dilakukan untuk memastikan keterpaduan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Isu-isu strategis dalam dokumen tersebut mengandung implikasi kebijakan yang relevan bagi



perencanaan pembangunan kabupaten Pacitan, khususnya dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan sektoral dan kewilayahan. Oleh karena itu, isu-isu yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan isu strategis daerah. Berikut ini adalah isu strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika:

1. Literasi digital inklusif dan penguatan system pengendalian informasi publik
2. Penerapan kmanajemen keamanan SPBE sesuai BSSN dan pengembangan CSIRT daerah
3. Penguatan Satu Data Daerah dan pemanfaatan analitik untuk perencanaan
4. Integrasi system SPBE lintas OPD dan penguatan infrastruktur digital daerah

2.2.2.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pacitan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2024–2044. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan wajib memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan yang ditinjau dari implikasi RTRW, yaitu :

1. Pengembangan jaringan telekomunikasi



Isu strategis yang dihadapi Diskominfo adalah keterbatasan pemerataan dan keandalan sistem jaringan telekomunikasi, baik jaringan tetap maupun jaringan bergerak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c pada RTRW Kabupaten Pacitan. Ketimpangan akses antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta perlunya dukungan infrastruktur yang memadai, menjadi tantangan dalam mendukung konektivitas digital, layanan publik berbasis elektronik, dan transformasi pemerintahan digital secara menyeluruh.

2. Pembangunan sistem informasi tata ruang

Salah satu isu strategis yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan adalah penguatan peran dalam mendukung keterbukaan informasi publik, khususnya terkait penyebaran informasi rencana tata ruang kepada masyarakat. Sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan penyediaan media pengumuman melalui penempelan atau pemasangan peta rencana tata ruang di tempat umum, media massa, dan sistem informasi tata ruang, Diskominfo memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh kanal komunikasi tersebut tersedia, terintegrasi, dan mudah diakses oleh masyarakat. Tantangan strategisnya terletak pada penyediaan infrastruktur digital yang merata, kapasitas pengelolaan konten yang informatif dan akurat, serta penguatan kolaborasi lintas sektor agar proses diseminasi informasi tata ruang tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tata ruang daerah. Isu ini menjadi relevan dalam konteks peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan



pembangunan wilayah berbasis informasi yang terbuka dan inklusif.

2.2.2.5 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengidentifikasi isu-isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Laporan ini memberikan dasar bagi kebijakan dan program pembangunan daerah, agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG). Oleh karena itu, isu-isu dalam KLHS RPJMD perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Isu-isu strategis yang relevan dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.

2.2.2.6 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Salah satu komponen penting dalam RPJMD adalah identifikasi isu strategis daerah (isu regional) yang bersumber dari kondisi faktual, potensi, serta tantangan pembangunan di wilayah Kabupaten Pacitan. Isu strategis tersebut menggambarkan agenda prioritas yang harus ditangani secara terencana dan terpadu oleh seluruh Perangkat Daerah. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Isu strategis daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pacitan perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan Perangkat Daerah agar tercipta keselarasan arah kebijakan dan efektivitas pencapaian



tujuan pembangunan daerah. Adapun isu strategis daerah yang relevan, yaitu terkait isu Big Data untuk pembangunan berkelanjutan.

1. Keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah belum optimal, berisiko menyebabkan kebocoran data dan gangguan layanan digital. Dinas Komunikasi dan Informatika perlu meningkatkan literasi, memperkuat infrastruktur, menyusun SOP, membentuk tim pengelola keamanan di OPD, dan melakukan audit berkala untuk menjaga keamanan layanan digital pemerintahan.
2. Pemanfaatan TIK dalam pemerintahan masih belum optimal, berdampak pada rendahnya efisiensi dan kualitas layanan publik digital. Dinas Kominfo perlu memperkuat integrasi sistem, meningkatkan kapasitas ASN, serta mengembangkan infrastruktur digital untuk mendukung layanan yang lebih efektif dan mudah diakses.
3. Penyelenggaraan statistik sektoral yang belum optimal menghambat ketersediaan data terintegrasi untuk kebijakan berbasis data. Dinas Kominfo perlu mendorong tata kelola data yang baik, meningkatkan kapasitas SDM, membentuk Forum Data Daerah, dan memperkuat kolaborasi dengan BPS agar data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Sebagai tindak lanjut dari hasil telaah terhadap berbagai sumber yang telah dijelaskan, perlu dilakukan integrasi untuk mengidentifikasi isu strategis perangkat daerah secara komprehensif. Proses integrasi ini mencakup isu global, potensi daerah, permasalahan pelayanan, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, KLHS RPJMD, RPJMD Kabupaten Pacitan



dan dokumen perencanaan lainnya. Rincian hasil integrasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 2.9 Perumusan Isu Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dibutuhkan infrastruktur komunikasi dan informasi yang andal, sehingga Diskominfo berperan dalam menyediakan layanan informasi publik, mengembangkan sistem informasi pemerintahan, serta mendukung jaringan komunikasi lintas kabupaten/kota.	Penyelenggaraa n Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi & komunikasi yang kurang maksimal	Penyelenggaraa n Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi & komunikasi yang kurang maksimal	Kesenjangan Akses Informasi dan Teknologi (SDG 9 & SDG 10)	Kerangka regulasi digital belum memadai	Literasi digital inklusif dan penguatan system pengendalian informasi publik	Penyelenggaraa n Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi & komunikasi yang kurang maksimal
			Rendahnya Literasi Digital Masyarakat (SDG 4 - Pendidikan Berkualitas)	Tata kelola dan ekosistem digital nasional belum kondusif		Peningkatan keterbukaan informasi publik Perangkat Daerah
	Penyelenggaraa n keamanan informasi di lingkungan pemerintah belum optimal	Penyelenggaraa n keamanan informasi di lingkungan pemerintah belum optimal	<i>Cybersecurity & data privacy risks</i>		Penerapan kmanajemen keamanan SPBE sesuai BSSN dan pengembangan CSIRT daerah	Penyelenggaraa n keamanan informasi di lingkungan pemerintah belum optimal



Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Belum optimalnya Penyelenggaraa n dan Pembangunan Statistik Sektoral	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	<i>Big data governance; Evidence-based policy</i>	Pemerataan dan kualitas infrastruktur digital masih rendah	Penguatan Satu Data Daerah dan pemanfaatan analitik untuk perencanaan	Belum Optimalnya penyelenggaraa n Satu Data Indonesia (SDI)
			<i>Automation, IoT, Digitization; Remote Work</i>	Terbatasnya kapasitas infrastruktur dan distribusi ketenagalistrika n	Integrasi system SPBE lintas OPD dan penguatan infrastruktur digital daerah	Belum optimalnya Penyelenggaraan dan Pembangunan Statistik Sektoral
						Penting bagi masyarakat memiliki akses yang mudah dan cepat terhadap layanan elektronik

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025



Berdasarkan hasil integrasi berbagai sumber perumusan isu strategis, sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebelumnya, telah teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama Perangkat Daerah. Isu-isu tersebut merepresentasikan kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pemenuhan mandat Perangkat Daerah. Isu strategis ini selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah. Uraian lebih lanjut mengenai isu strategis Perangkat Daerah disajikan sebagai berikut:

1. Penting bagi masyarakat memiliki akses yang mudah dan cepat terhadap layanan elektronik;
2. Belum Optimalnya penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI);
3. Peningkatan keterbukaan informasi publik Perangkat Daerah;
4. Penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan pemerintah belum optimal;
5. Penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi & komunikasi yang kurang maksimal; dan
6. Belum optimalnya Penyelenggaraan dan Pembangunan Statistik Sektoral.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Visi Kabupaten Pacitan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Pacitan Semakin Sejahtera Bahagia”

Visi tersebut tidak hanya mencerminkan target kondisi di akhir periode perencanaan, tetapi juga menjadi tolok ukur capaian



pembangunan jangka menengah Kabupaten Pacitan. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Kabupaten Pacitan menetapkan sejumlah misi sebagai arah kebijakan pembangunan:

Misi 1 : Pemberantasan Kemiskinan

Misi ini merupakan misi utama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang menjadi prioritas pemerintah ke depan. Pemerintah memiliki tanggung jawab penting untuk membebaskan masyarakat dari jerat kemiskinan guna meningkatkan harkat dan martabat sebagai manusia. Walaupun kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang tidak sepenuhnya dapat dihilangkan dalam proses pembangunan suatu negara atau daerah, kehadiran pemerintah tetap menjadi keharusan. Pemerintah dituntut untuk berpihak kepada masyarakat miskin, meringankan beban hidup mereka, serta membuka akses bagi peningkatan kesejahteraan.

Misi 2 : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Pacitan agar lebih unggul dan kompetitif, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Fokus utama misi ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan mutu serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, fasilitasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta investasi di bidang pengembangan sumber daya manusia.



Dengan upaya tersebut, diharapkan kualitas dan daya saing masyarakat akan terus mengalami peningkatan.

Misi 3 : Memajukan Pariwisata untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Misi ini bertujuan untuk memperkuat laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang bersifat inklusif, yaitu melibatkan partisipasi seluas mungkin dari seluruh lapisan masyarakat.

Misi 4 : Memperkuat Birokrasi yang Profesional dan Melayani

Misi ini diarahkan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang gesit, adaptif terhadap perubahan regulasi, profesional, transparan, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Keberhasilan pembangunan ekonomi sangat bergantung pada kualitas birokrasi yang dimiliki. Oleh karena itu, seluruh proses perencanaan hingga pelaksanaan program harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai pelayan publik, birokrasi dituntut untuk memberikan layanan terbaik serta memastikan keterbukaan dalam penerapan regulasi dan kebijakan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan berperan dalam **mendukung misi ke-4 tujuan Mewujudkan Pelayanan Publik Secara Online Dan Terintegrasi**, dan sasaran **Terciptanya Birokrasi yang Profesional dan Melayani** dari RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran



Dinas Komunikasi dan Informatika untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.1 Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima Dan Inovatif NSPK : UU No 23 tahun 2014	Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital melalui penguatan statistik sektoral dan persandian		Nilai indeks SPBE	3,8	1,51*	1,61*	1,71*	1,81*	1,91*	
		Meningkatnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan	Predikat Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	90	94	96	98	98	99	
		Meningkatnya Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	Tingkat kematangan layanan publik berbasis elektronik	4	4,17	4,33	4,5	4,6	4,8	
		Meningkatnya Kualitas data Statistik Sektoral Daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,37	2,42	2,47	2,52	2,57	2,62	
		Meningkatnya Tata Kelola Keamanan Informasi	Indeks Keamanan (KAMI)	27,13	36,28	36,43	36,59	36,74	36,90	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya kualitas layanan tata kelola Pemerintah Daerah	Hasil Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	90	90,4	90,8	91,2	91,6	92	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

*Keterangan * : instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital mulai tahun 2026 sehingga target disesuaikan.*



Berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD, khususnya pada sasaran terciptanya birokrasi yang profesional dan melayani. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital melalui penguatan statistik sektoral dan persandian. Tujuan ini difokuskan untuk mendukung terwujudnya pelayanan publik yang modern, responsif, dan berbasis teknologi informasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran utama, yaitu:

1. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.
2. Meningkatnya layanan pemerintah berbasis elektronik yang mampu mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas data statistik sektoral daerah sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan.
4. Meningkatnya tata kelola keamanan informasi untuk menjamin perlindungan data dan sistem pemerintahan.
5. Meningkatnya kualitas layanan tata kelola pemerintah daerah secara menyeluruh.

Dengan perumusan tujuan dan sasaran ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan lebih efektif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik yang terbuka, akuntabel, dan berkualitas.

Perumusan tujuan dan sasaran di atas juga didasarkan pada pendekatan *logical framework* dan pohon kinerja. Berikut ini disajikan



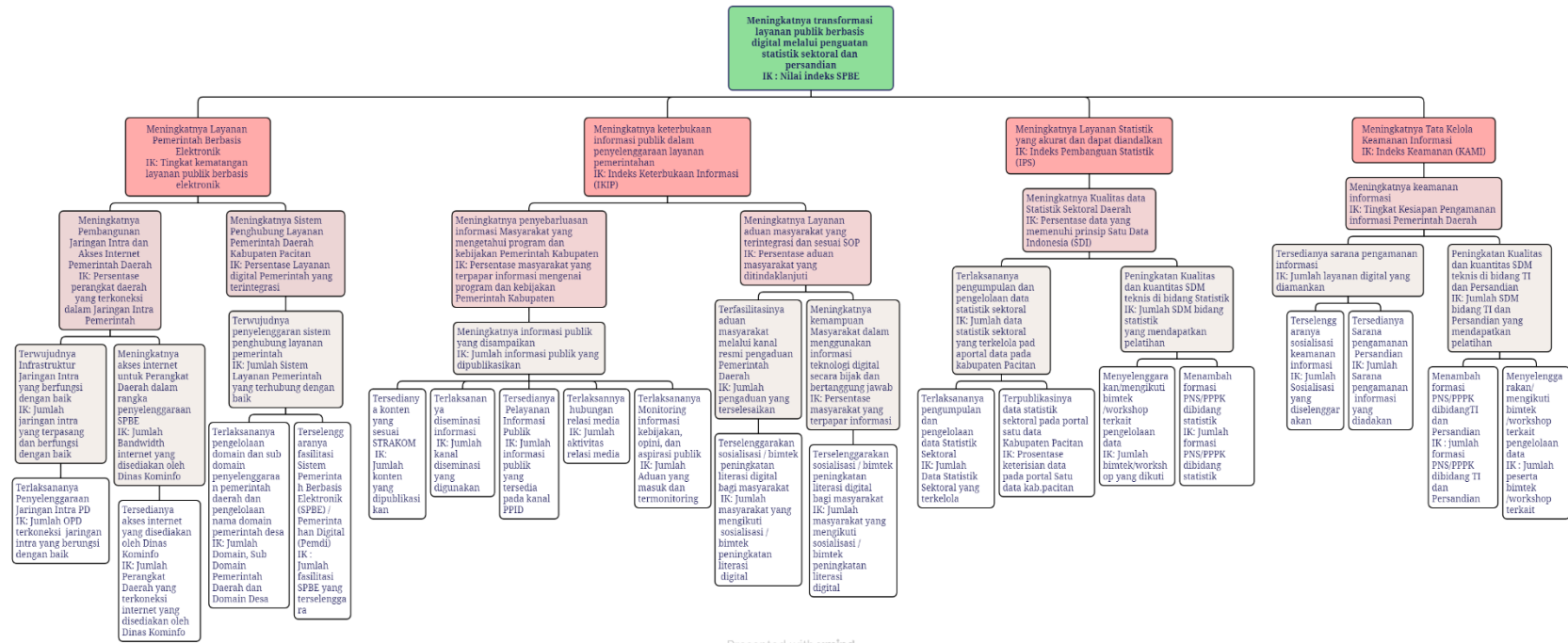
gambaran mengenai *logical framework* dan pohon kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, yang merupakan alat untuk memetakan hubungan antara input, output, outcome, dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur.



Presented with xmind

Gambar 3.1 Logical Framework Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025



Presented with xmlind

Gambar 3.2 Pohon Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025



Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Kab. Pacitan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target Tahun						Kondisi Akhir	KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital melalui penguatan statistik sektoral dan persandian		Nilai indeks SPBE	3,8	1,51*	1,61*	1,71*	1,81*	1,91*	1,91*	
	Meningkatnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan	Predikat Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	90	94	96	98	98	99	99	
	Meningkatnya Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	Tingkat kematangan layanan publik berbasis elektronik	4	4,17	4,33	4,5	4,6	4,8	4,8	
	Meningkatnya Kualitas data Statistik Sektoral Daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,37	2,42	2,47	2,52	2,57	2,62	2,62	
	Meningkatnya Tata Kelola Keamanan Informasi	Indeks Keamanan (KAMI)	27,13	36,28	36,43	36,59	36,74	36,90	27,13	
	Meningkatnya kualitas layanan tata kelola Pemerintah Daerah	Hasil Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	90	90,4	90,8	91,2	91,6	92	92	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Keterangan * : instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital mulai tahun 2026 sehingga target disesuaikan.



3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

3.2.1 Strategi Perangkat Daerah

Strategi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program /kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Subbab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029.

Tabel 3.3 Penentuan Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
		Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital melalui penguatan statistik sektoral dan persandian	
1	• Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum sesuai dengan kaidah arsitektur SPBE • Penyebaran informasi publik dan literasi digital masyarakat belum optimal	Meningkatnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan	1. Meningkatkan layanan pemerintahan digital yang terintegrasi dan responsive 2. Mewujudkan sistem keamanan informasi yang tangguh melalui penerapan perlindungan data



No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
			3. Meningkatkan kompetensi ASN dan masyarakat melalui pelatihan literasi digital dan komunikasi publik
2	• Rendahnya kepedulian pemerintah terhadap Keamanan data, Informasi dan Komunikasi dari akses dan gangguan • Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia Statistik	Meningkatnya Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	1. Penguatan tata kelola dan integrasi data statistik berbasis TIK 2. Peningkatan kapasitas SDM dan kolaborasi OPD dalam pengelolaan data statistik
3	• Kesadaran dan pemahaman OPD terhadap informasi yang masih kurang • Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia keamanan informasi	Meningkatnya Kualitas data Statistik Sektorial Daerah	1. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan keamanan informasi berbasis risiko 2. Memperkuat kapasitas dan kolaborasi OPD dalam tata kelola keamanan informasi

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Pentahapan program 2026–2030 dilaksanakan secara bertahap mulai dari pembangunan pondasi melalui pemetaan kebutuhan, peningkatan layanan digital, penguatan SDM statistik, dan dasar keamanan informasi (2026), dilanjutkan dengan pengembangan sistem terintegrasi, infrastruktur TIK, pelatihan SDM, verifikasi data, serta penyusunan kebijakan keamanan (2027), kemudian



implementasi skala luas seperti super apps, interoperabilitas sistem, kurikulum literasi digital adaptif, sistem statistik sektoral, serta pengendalian teknis keamanan (2028), selanjutnya penguatan integrasi lintas OPD, pemanfaatan data untuk perencanaan daerah, penetapan SOP, audit keamanan, dan evaluasi manajemen risiko (2029), hingga tahap akhir berupa replikasi menyeluruh, pelibatan komunitas, optimalisasi data untuk pengambilan keputusan, dan penguatan keberlanjutan budaya keamanan informasi (2030).



Tabel 3.4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1. Peningkatan layanan pemerintahan digital 2. Pemetaan kebutuhan layanan digital dan infrastruktur 3. Penguatan pelatihan literasi digital	1. Pengembangan sistem layanan digital terintegrasi 2. Penguatan infrastruktur dan jaringan TIK 3. Mulai pelatihan literasi digital	1. Penerapan super apps layanan publik 2. Interoperabilitas sistem antar layanan 3. Implementasi kurikulum literasi digital adaptif	1. Integrasi sistem layanan lintas OPD 2. Pengukuran tingkat literasi dan partisipasi digital masyarakat	1. Replikasi ke seluruh perangkat daerah 2. Pelibatan komunitas dalam literasi digital berkelanjutan
1. Pemetaan kebutuhan data dan SDM statistik sectoral 2. Pengembangan sistem informasi statistik daerah	1. Pelatihan dasar SDM statistik OPD 2. Pengumpulan dan verifikasi data sektoral	1. Membangun dasar kompetensi SDM 2. Implementasi sistem statistik sektoral	1. Pemanfaatan data untuk perencanaan daerah 2. Penetapan SOP dan standar data sektora	1. Evaluasi, replikasi, dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan



1. Penguatan keamanan informasi 2. Pelatihan dasar tim keamanan informasi berbasis risiko	1. Penyusunan kebijakan keamanan informasi 2. Identifikasi dan klasifikasi aset informasi	1. Implementasi pengendalian teknis dan prosedural keamanan 2. Simulasi penanganan insiden siber	1. Audit internal sistem keamanan informasi 2. Evaluasi efektivitas manajemen risiko	1. Penguatan keberlanjutan dan budaya keamanan informasi
---	---	--	--	--

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025



3.2.2 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Selain itu arah kebijakan Renstra PD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3.5 Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
	- Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota. - Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	1. Percepatan digitalisasi layanan publik 2. Peningkatan Inovasi Pelayanan Publik 3. Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah	1. Penguatan tata kelola proses bisnis SPBE 2. Optimalisasi infrastruktur TIK dan dokumentasi SPBE 3. Peningkatan literasi digital dan media komunikasi publik 4. Efisiensi dan kolaborasi pengadaan TIK untuk inovasi layanan	1. Peningkatan layanan pemerintahan digital 2. Pemetaan kebutuhan layanan digital dan infrastruktur 3. Penguatan pelatihan literasi digital
	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota.		1. Peningkatan kapasitas SDM statistik berbasis data 2. Penguatan tata kelola dan pemanfaatan data sektoral.	1. Pemetaan kebutuhan data & SDM statistik sektoral 2. Pengembangan sistem informasi statistik daerah



NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
	- persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. - Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah kabupaten/kota.		1. Peningkatan edukasi dan pendampingan teknis penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan OPD 2. Penguatan kapasitas SDM dalam pengelolaan keamanan informasi berbasis risiko	4. Penguatan keamanan informasi 5. Pelatihan dasar tim keamanan informasi berbasis risiko

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025



**Tabel 3.6 Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Infomatika
Kabupaten Pacitan**

VISI	Pacitan Semakin Sejahtera Bahagia		
MISI	Mewujudkan Pelayanan Publik Secara Online Dan Terintegrasi		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital melalui penguatan statistik sektoral dan persandian	Meningkatnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan	1. Meningkatkan layanan pemerintahan digital yang terintegrasi dan responsive 2. Mewujudkan sistem keamanan informasi yang tangguh melalui penerapan perlindungan data 3. Meningkatkan kompetensi ASN dan masyarakat melalui pelatihan literasi digital dan komunikasi publik	1. Penguatan tata kelola proses bisnis SPBE 2. Optimalisasi infrastruktur TIK dan dokumentasi SPBE 3. Peningkatan literasi digital dan media komunikasi publik Efisiensi dan kolaborasi pengadaan TIK untuk inovasi layanan
	Meningkatnya Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik		
	Meningkatnya Kualitas data Statistik Sektoral Daerah	1. Penguatan tata kelola dan integrasi data statistik berbasis TIK 2. Peningkatan kapasitas SDM dan kolaborasi OPD dalam pengelolaan data statistik	1. Peningkatan kapasitas SDM statistik berbasis data 2. Penguatan tata kelola dan pemanfaatan data sektoral.



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya Tata Kelola Keamanan Informasi	1. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan keamanan informasi berbasis risiko 2. Memperkuat kapasitas dan kolaborasi OPD dalam tata kelola keamanan informasi	1. Peningkatan edukasi dan pendampingan teknis penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan OPD 2. Penguatan kapasitas SDM dalam pengelolaan keamanan

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III (Tiga) dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini. Program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika, yang merupakan hasil dari *cascading* tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian *outcome* dan *output* yang diharapkan.



**Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pacitan**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Sasaran: Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima Dan Inovatif NSPK - Pengelolaan informasi dan komunikasi public Pemerintah Daerah kabupaten/kota - Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota - Pengelolaan e-government di lingkup Pemerinta Daerah kabupaten/kota.	Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital melalui penguatan statistik sektoral dan persandian	Meningkatnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggara an layanan pemerintahan			Nilai indeks SPBE		
					Predikat Keterbukaan Informasi Publik (KIP)		
			Meningkatnya penyebaran informasi Masyarakat yang mengetahui program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten		Persentase masyarakat yang terpapar informasi mengenai program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Meningkatnya informasi publik yang disampaikan	Jumlah informasi publik yang dipublikasikan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	
					Jumlah Konten Informasi Publik	Penyusunan Konten	
					Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan statistic sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota.					informasi dan komunikasi publik		
					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Diseminasi Informasi	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
					Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Relasi Media	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah		
			Meningkatnya Layanan aduan masyarakat yang terintegrasi dan sesuai SOP		Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Terfasilitasinya aduan masyarakat melalui kanal resmi pengaduan Pemerintah Daerah	Jumlah pengaduan yang terselesaikan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
					Persentase masyarakat yang terpapar informasi mengenai program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	
		Meningkatnya Layanan			Tingkat kematangan		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
		Pemerintah Berbasis Elektronik			layanan publik berbasis elektronik		
			Meningkatnya Pembangunan Jaringan Intra dan Akses Internet Pemerintah Daerah		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi dalam Jaringan Intra Pemerintah	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Terwujudnya Infrastruktur Jaringan Intra yang berfungsi dengan baik		Jumlah jaringan intra yang terpasang dan berfungsi dengan baik	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
					Jumlah Bandwidth internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Penyediaan Akses Internet	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Sistem Layanan Pemerintah yang terhubung dengan baik	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
					Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	
					Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
					Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik,	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional		
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
					Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
					Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					penyelenggaraan SPBE		
					Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
					Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	
		Meningkatnya Kualitas data Statistik Sektoral Daerah			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		
			Meningkatnya Kualitas data Statistik Sektoral Daerah		Presentase kegiatan yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia (SDI)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
				Terlaksananya pengumpulan dan	Jumlah data statistik sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				pengelolaan data statistik sektoral	yang terkelola pada aportal data pada kabupaten Pacitan	Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
					Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah SDM bidang statistik yang mendapatkan pelatihan	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
					Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
		Meningkatnya Tata Kelola Keamanan Informasi			Indeks Keamanan (KAMI)		
			Meningkatnya keamanan informasi		Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
				Tersedianya sarana pengamanan informasi	Jumlah layanan digital yang diamankan	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Persandian Pemerintah Daerah	
					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
					Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah SDM bidang TI dan Persandian yang mendapatkan pelatihan	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025



Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya:



Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						6.946.233.899,00		7.293.545.000,00		7.585.287.000,00		7.888.699.000,00		8.504.247.000,00
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.199.009.000,00		4.069.563.269,00		4.273.041.000,00		4.443.963.000,00		4.621.722.000,00		4.806.591.000,00
Outcome Program : Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%)	72,30	72,30	4.199.009.000,00	71,30	4.069.563.269,00	71,70	4.273.041.000,00	72,10	4.443.963.000,00	72,50	4.621.722.000,00	72,90	4.806.591.000,00
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Outcome Kegiatan: Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	0	16	72.951.700,00	10	72.951.700,00	10	72.951.700,00	10	72.951.700,00	10	72.951.700,00	10	82.951.700,00
2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														



Outcome : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	7.000.000,00	6	7.000.000,00	6	7.000.000,00	6	7.000.000,00	6	7.000.000,00	6	8.000.000,00
2.16.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
Outcome : Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2	8.000.000,00
2.16.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
Outcome : Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2	8.000.000,00
2.16.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
Outcome : Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	0	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2	8.000.000,00



	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)													
2.16.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
Outcome : Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2	8.000.000,00
2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
Outcome : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	3	7.000.000,00	3	7.000.000,00	3	7.000.000,00	3	7.000.000,00	3	7.000.000,00	3	8.000.000,00



2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Outcome : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	12	7.000.000,00	12	7.000.000,00	12	7.000.000,00	12	7.000.000,00	12	7.000.000,00	12	8.000.000,00
2.16.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
Outcome : Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00
2.16.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
Outcome : Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	10	7.000.000,00	10	7.000.000,00	10	7.000.000,00	10	7.000.000,00	10	7.000.000,00	10	8.000.000,00



2.16.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
Outcome : Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00
2.16.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														
Outcome : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	3	2.951.700,00	3	2.951.700,00	3	2.951.700,00	3	2.951.700,00	3	2.951.700,00	3	2.951.700,00



2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Outcome Kegiatan : Tersusunnya laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tertib dan Transparan	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	38	59	2.930.650.910	56	2.801.205.179,00	2	2.930.650.910,00	2	2.960.650.910,00	2	2.990.650.910,00	2	3.044.650.910,00
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
Outcome : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19	27	2.525.792.184	27	2.525.792.184,00	27	2.525.792.184,00	27	2.525.792.184,00	27	2.525.792.184,00	27	2.535.792.184,00
2.16.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	18	347.815.691	18	218.815.691,00	18	347.815.691,00	18	347.815.691,00	18	347.815.691,00	18	347.815.691,00
2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
Outcome : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	11.351.835	2	10.906.104,00	2	11.351.835,00	2	11.351.835,00	2	11.351.835,00	2	11.351.835,00



	Akhir Tahun SKPD (Laporan)													
2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
Outcome : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	36	36	45.691.200	36	45.691.200,00	36	45.691.200,00	36	75.691.200,00	36	105.691.200,00	36	149.691.200,00
2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Outcome : Terpenuhiya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian (%)	100%	100%	188.778.000,00	100%	188.778.000,00	100%	189.778.000,00	100%	212.778.000,00	100%	242.778.000,00	100%	257.778.000,00
2.16.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														



Outcome : Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	16.838.000	1	16.838.000,00	1	17.838.000,00	1	40.838.000,00	1	70.838.000,00	1	85.838.000,00
2.16.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
Outcome : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	20	20	171.940.000,00	20	171.940.000,00	20	171.940.000,00	20	171.940.000,00	20	171.940.000,00	20	171.940.000,00
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Outcome : Terpenuhi operasional dasar perangkat daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi (%)	100%	100%	235.012.724,00	100%	235.012.724,00	100%	235.012.724,00	100%	272.351.550,00	100%	285.541.550,00	100%	285.872.550,00
2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Outcome : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	15.143.400,00	1	15.143.400,00	1	15.143.400,00	1	15.143.400,00	1	15.143.400,00	1	15.143.400,00



2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Outcome : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7	55.926.224, 00	7	55.926.224, 00	7	55.926.224, 00	7	93.265.050, 00	7	106.455.05 0,00	7	106.786.050, 00
2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
Outcome : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1	20.000.000, 00	1	20.000.000, 00	1	20.000.000, 00	1	20.000.000, 00	1	20.000.000, 00	1	20.000.000,0 0
2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
Outcome : Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	30.954.000, 00	4	30.954.000, 00	4	30.954.000, 00	4	30.954.000, 00	4	30.954.000, 00	4	30.954.000,0 0
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
Outcome : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan (Paket)	5	5	10.407.200, 00	5	10.407.200, 00	5	10.407.200, 00	5	10.407.200, 00	5	10.407.200, 00	5	10.407.200,0 0



2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Outcome : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	69.490.000,00	12	69.490.000,00	12	69.490.000,00	12	69.490.000,00	12	69.490.000,00	12	69.490.000,00
2.16.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
Outcome : Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	33.091.900,00	1	33.091.900,00	1	33.091.900,00	1	33.091.900,00	1	33.091.900,00	1	33.091.900,00
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Outcome : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah yang dibutuhkan	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan (%)	100%	100%	8.815.000,00	100%	8.815.000,00	100%	61.846.826,00	100%	122.430.000,00	100%	206.999.999,00	100%	291.568.000,00
2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel														



Outcome : Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	30.000.000,00	10	70.000.000,00	10	100.000.000,00	10	130.000.000,00
2.16.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Outcome : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	2	3.815.000,00	5	3.815.000,00	3	31.846.826,00	3	52.430.000,00	5	106.999.999,00	5	161.568.000,00
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Outcome : Tersedianya jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang sesuai perundangan	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan (%)	100%	100%	635.879.840,00	100%	635.879.840,00	100%	635.879.840,00	100%	635.879.840,00	100%	635.879.840,00	100%	635.879.840,00
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Outcome : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	143.099.240,00	12	143.099.240,00	12	143.099.240,00	12	143.099.240,00	12	143.099.240,00	12	143.099.240,00
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														



Outcome : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	492.780.600,00	12	492.780.600,00	12	492.780.600,00	12	492.780.600,00	12	492.780.600,00	12	492.780.600,00
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Outcome : Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik (%)	80%	80%	126.920.826,00	80%	126.920.826,00	80%	146.921.000,00	80%	166.921.000,00	80%	186.920.001,00	80%	207.890.000,00
2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Outcome : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	17	17	30.000.000,00	17	30.000.000,00	17	35.000.000,00	17	40.000.000,00	17	45.000.000,00	17	50.000.000,00
2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														



Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	22	22	14.000.000, 00	22	14.000.000, 00	24	19.000.000, 00	26	24.000.000, 00	28	29.000.000, 00	30	34.000.000,0 0
2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi (Unit)	2	2	10.000.000, 00	2	10.000.000, 00	2	15.000.000, 00	2	20.000.000, 00	2	25.000.000, 00	2	30.000.000,0 0
2.16.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi (Unit)	3	3	72.920.826, 00	3	72.920.826, 00	3	77.921.000, 00	3	82.921.000, 00	3	87.920.001, 00	3	93.890.000,0 0
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						1.207.671.2 32,00		1.268.055.0 00,00		1.318.777.0 00,00		1.371.528.0 00,00		1.426.389.00 0,00
Outcome Program 1: Meningkatnya Layanan aduan masyarakat yang terintegrasi dan sesuai SOP	Prosentase aduan masyarakat yang ditindaklanj uti (%)	100	100	175.000.00 0	100	307.671.23 2,00	100	358.055.00 0,00	100	398.777.00 0,00	100	441.528.00 0,00	100	486.389.000, 00



Outcome Program 2: Meningkatnya penyebaran informasi Masyarakat yang mengetahui program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten	Persentase Masyarakat Yang Terpapar Informasi Mengenai Program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten (%)	97,87	90,00	900.000.00 0,00	100	900.000.00 0,00	100	910.000.00 0,00	100	920.000.00 0,00	100	930.000.00 0,00	100	940.000.000, 00
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
Outcome Kegiatan: Meningkatnya informasi publik yang disampaikan	Jumlah informasi publik yang dipublikasikan (Informasi)	1575	1575	1.156.250.0 00	1600	1.156.250.0 00,00	1625	1.166.250.0 00,00	1650	1.176.250.0 00,00	1675	1.186.250.0 00,00	1675	1.196.250.00 0,00
2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														
Outcome : Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	1	1	75.000.000	1	207.671.23 2,00	1	258.055.00 0,00	1	298.777.00 0,00	1	341.528.00 0,00	1	386.389.000, 00
2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik														



Outcome : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	0	0	100.000.00 0,00	1	100.000.00 0,00	2	100.000.00 0,00	3	100.000.00 0,00	4	100.000.00 0,00	5	100.000.000, 00
2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media														
Outcome : Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	0	4	500.000.00 0,00	4	200.000.00 0,00	4	200.000.00 0,00	4	200.000.00 0,00	4	200.000.00 0,00	4	200.000.000, 00
2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														
Outcome : Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	0	4	50.000.000, 00	6	50.000.000, 00	8	65.000.000, 00	10	75.000.000, 00	12	85.000.000, 00	14	95.000.000,0 0



2.16.02.2.01.0016 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik														
Outcome : Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif , Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik														
Outcome : Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	10	10	304.457.000	10	95.000.000,00	10	95.000.000,00	10	95.000.000,00	10	95.000.000,00	10	95.000.000,00
2.16.02.2.01.0018 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik														



Outcome : Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	0	0	25.500.000	100	25.000.000, 00	100	25.000.000, 00	100	25.000.000, 00	100	25.000.000, 00	100	25.000.000,0 0
2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi														
Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	97,87	100	150.000.00 0	100	205.000.00 0,00	100	190.000.00 0,00	100	180.000.00 0,00	100	170.000.00 0,00	100	160.000.000, 00
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
Outcome : Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaat an media berbayar sesuai kriteria/jukni s (Media)	43	43	155.500.00 0	63	150.000.00 0,00	65	150.000.00 0,00	67	150.000.00 0,00	69	150.000.00 0,00	71	150.000.000, 00
2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik														



Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	0	1	45.250.000	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00
2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten														
Outcome : Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	1.575	1.575	125.000.000	1.600	125.000.000,00	1.625	135.000.000,00	1.650	145.000.000,00	1.675	155.000.000,00	1.700	165.000.000,00
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA														
Outcome Program 1: Meningkatnya Pembangunan Jaringan Intra dan Akses Internet Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi dalam Jaringan Intra Pemerintah (%)	41,02	51,28	1.000.000.000,00	58,97	1.000.000.000,00	66,67	1.000.000.000,00	74,36	1.000.000.000,00	79,49	1.000.000.000,00	84,62	1.271.267.000,00
Outcome Program 2: Meningkatnya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan	Prosentase Layanan Digital Pemerintah yang Terintegrasi (%)	15	20	115.538.840	25	668.999.398,00	30	752.449.000,00	35	822.547.000,00	40	895.449.000,00	45	1.000.000.000,00
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
Outcome Kegiatan 1: Meningkatnya akses internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Bandwidth internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Mbps)	0	510	500.000.000,00	690	500.000.000,00	780	580.000.000,00	870	640.000.000,00	930	690.000.000,00	990	785.000.000,00



Outcome Kegiatan 2: Terwujudnya Infrastruktur Jaringan Intra yang berfungsi dengan baik	Jumlah jaringan intra yang terpasang dan berfungsi dengan baik (Perangkat Daerah)	17	17	500.000.00 0,00	23	500.000.00 0,00	26	500.000.00 0,00	29	500.000.00 0,00	31	500.000.00 0,00	34	671.267.000, 00
2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet														
Outcome : Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	0	3	500.000.00 0,00	3	500.000.00 0,00	3	500.000.00 0,00	3	500.000.00 0,00	3	500.000.00 0,00	3	600.000.000, 00
2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
Outcome : Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	17	17	500.000.00 0,00	23	500.000.00 0,00	26	500.000.00 0,00	29	500.000.00 0,00	31	500.000.00 0,00	34	671.267.000, 00
2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional														



Outcome : Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	0	1	30.000.000,00	1	40.000.000,00	2	55.000.000,00	3	60.000.000,00	4	70.000.000,00	5	75.000.000,00
2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														
Outcome : Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	45.000.000,00	1	65.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00	1	95.000.000,00
2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi														
Outcome : Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	0	2	100.000.000	2	50.000.000,00	3	65.000.000,00	4	70.000.000,00	5	80.000.000,00	6	110.000.000,00



2.16.03.2.02.0026 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo														
Outcome : Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyeleng- araan Audit TIK sesuai kewenanga n Dinas Kominfo (Dokumen)	0	0	50.000.000	1	55.000.000, 00	1	65.000.000, 00	1	70.000.000, 00	1	80.000.000, 00	1	90.000.000,0 0
2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE														
Outcome : Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangk an sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangun an dan pengemban gan aplikasi	0	0	150.000.00 0	5	75.000.000, 00	6	95.000.000, 00	7	100.000.00 0,00	8	105.000.00 0,00	9	120.000.000, 00



	SPBE (Aplikasi)													
2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														
Outcome : Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	0	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	55.000.000,00	12	65.000.000,00
2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan														
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	0	0	35.000.000,00	0	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00
2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE														
Outcome : Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi	0	0	35.000.000,00	0	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00



	penyelenggaraan SPBE (Laporan)													
2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah														
Outcome : Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	0	0	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00
2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas														
Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	0	0	35.000.000	0	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00



2.16.03.2.02.0039 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi														
Outcome : Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	0	0	45.250.000	0	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00
2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
Outcome Kegiatan : Terwujudnya penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah Sistem Layanan Pemerintah yang terhubung dengan baik	3	3	115.538.840	4	168.999.398,00	5	172.449.000,00	6	182.547.000,00	7	205.449.000,00	8	215.000.000,00
2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa														
Outcome : Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain	3	3	115.538.840	4	168.999.398,00	5	172.449.000,00	6	182.547.000,00	7	205.449.000,00	8	215.000.000,00



	Pemerintah Desa (Dokumen)													
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				217.180.00 0,00		211.320.99 1,00		221.887.00 0,00		230.762.00 0,00		239.992.00 0,00		249.592.000, 00
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL														
Outcome Program: Meningkatnya Kualitas data Statistik Sektoral Daerah	Prosentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	100	100	217.180.00 0,00	100	211.320.99 1,00	100	221.887.00 0,00	100	230.762.00 0,00	100	239.992.00 0,00	100	249.592.000, 00
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														
Outcome Kegiatan: Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data statistik sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang terkelola pada portal data pada kabupaten Pacitan (Data)	607	607	217.180.00 0	666	211.320.99 1,00	720	221.887.00 0,00	774	230.762.00 0,00	828	239.992.00 0,00	100	249.592.000, 00
2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional														



Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatka n rekomendas i dari pembina data statistik (%)	96	96	50.000.000, 00	100	50.000.000, 00	100	50.000.000, 00	100	50.000.000, 00	100	50.000.000, 00	100	50.000.000,0 0
2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia														
Outcome : Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadada, interoperabil itas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	14	14	44.140.991, 00	22	44.140.991, 00	29	52.535.000, 00	37	58.120.000, 00	44	64.010.000, 00	51	70.221.000,0 0
2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral														
Outcome : Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	0	100	10.000.000, 00	100	10.000.000, 00	100	10.000.000, 00	100	10.000.000, 00	100	10.000.000, 00	100	10.000.000,0 0



2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
Outcome : Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	0	1	7.180.000,00	1	7.180.000,00	2	9.352.000,00	3	12.642.000,00	4	15.982.000,00	5	19.371.000,00
2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														
Outcome : Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	96	96	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00
2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral														
Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				8.360.000,00		7.942.000,00		8.339.000,00		8.673.000,00		9.020.000,00		9.381.000,00



2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI														
Outcome Program: Meningkatnya keamanan informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	234	235	8.360.000,0 0	236	7.942.000,0 0	237	8.339.000,0 0	238	8.673.000,0 0	239	9.020.000,0 0	240	9.381.000,00
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
Outcome Kegiatan 1: Tersedianya sarana pengamanan informasi	Jumlah layanan digital yang diamankan	3	3	4.000.000,0 0	3	4.000.000,0 0	3	4.000.000,0 0	3	4.000.000,0 0	3	4.000.000,0 0	3	4.000.000,00
Outcome Kegiatan 2: Meningkatnya kompetensi dan pengetahuan SDM bidang TI dan Persandian	Jumlah SDM bidang TI dan Persandian yang mendapatkan pelatihan	0	10	4.360.000,0 0	1	3.942.000,0 0	1	4.339.000,0 0	1	4.673.000,0 0	1	5.020.000,0 0	1	5.381.000,00
2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
Outcome: Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan	3	3	2.000.000,0 0	3	2.000.000,0 0	3	2.000.000,0 0	3	2.000.000,0 0	3	2.000.000,0 0	3	2.000.000,00



	Persandian (Perangkat Daerah)													
2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
Outcome: Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalanka n penyelengg araan persandian (Dokumen)	0	1	2.000.000,0 0	1	2.000.000,0 0	1	2.000.000,0 0	1	2.000.000,0 0	1	2.000.000,0 0	2.000.000,00	



2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
Outcome: Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	0	1	2.360.000,0 0	1	1.942.000,0 0	1	2.339.000,0 0	1	2.673.000,0 0	1	3.020.000,0 0	1	3.381.000,00
2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan														
Outcome: Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	0	1	2.000.000,0 0	1	2.000.000,0 0	1	2.000.000,0 0	1	2.000.000,0 0	1	2.000.000,0 0	1	2.000.000,00

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025



Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan subkegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta subkegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah.



**Tabel 4. 3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah**

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Program pengelolaan aplikasi informatika	Meningkatnya Pembangunan Jaringan Intra dan Akses Internet Pemerintah Daerah	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pacitan Satu Data
				Penyediaan Akses Internet	
				Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	
				Koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	
				Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
2	Program pengelolaan	Meningkatnya penyebaran informasi	Pengelolaan Informasi dan	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Relasi Media Kemitraan Komunikasi
				Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Keterangan
	informasi dan komunikasi publik	Masyarakat yang mengetahui program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten	Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
				Diseminasi Informasi	
				Pelayanan Informasi Publik	
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
3	Program, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Meningkatnya keamanan informasi Meningkatnya Kualitas data Statistik Meningkatnya keamanan informasi Meningkatnya Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
				Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
				Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	
				Pengelolaan Kegiatan	



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Keterangan
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	
				Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
				Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kualitas data Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	
				Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
				Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	

Sumber: Dinas Komunikasi dan informatika, 2025



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKU bersifat *outcome-oriented* dan digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama perangkat daerah terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan.



Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai indeks SPBE	Nilai	3,8	1,51*	1,61*	1,71*	1,81*	1,91*	Tujuan PD (Indeks SPBE merupakan hasil penilaian dari Kemenpan RB)
2	Predikat Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Nilai	90	94	96	98	98	99	Sasaran PD (Hasil Monev dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur)
3	Tingkat kematangan layanan publik berbasis elektronik	Nilai	4	4,17	4,33	4,5	4,6	4,8	Sasaran PD (Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik biasanya merujuk pada model <i>e-Government Maturity</i> yang digunakan oleh Kementerian PANRB)
4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Nilai	2,37	2,42	2,47	2,52	2,57	2,62	Sasaran PD (Indeks IPS merupakan hasil penilaian dari Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral)
5	Indeks Keamanan (KAMI)	Nilai	27,13	36,28	36,43	36,59	36,74	36,90	Sasaran PD (mengacu pada Indeks KAMI yang disusun oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai alat evaluasi terhadap tingkat kesiapan (maturity level) penerapan keamanan di instansi pemerintah)
6	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	90	90,4	90,8	91,2	91,6	92	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Ket * : instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital sehingga target nasional disesuaikan.



Pada tabel diatas Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di bidang digitalisasi dan tata kelola informasi, dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan publik berbasis elektronik, transparansi, serta keamanan informasi. Target capaian mencakup peningkatan nilai indeks SPBE dari 3,5 (2025) menjadi 1,91* (2030), serta perbaikan predikat keterbukaan informasi publik dari 90 (2025) hingga 99 (2030). Selain itu, tingkat kematangan layanan publik berbasis elektronik terus ditingkatkan dari 4 (2025) menjadi 4,8 (2030). Pada aspek data, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) ditargetkan naik dari 2,37 (2025) menjadi 2,62 (2030). Di sisi keamanan, Indeks KAMI juga diperkuat dari 175 (2025) menjadi 238 (2030). Secara keseluruhan, indikator ini menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat transformasi digital, transparansi informasi, serta keamanan sistem pemerintahan elektronik secara berkelanjutan.

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:



Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Rumus Hitung	Baseline	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/ atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo / Jumlah	43,59	51,28	58,97	66,67	74,36	74,49	84,62	84,62



			<i>Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah x100%</i>								
2	<i>Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/ Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah tingkat kab/kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah / Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah tingkat</i>	43,59	51,28	58,97	66,67	74,36	74,49	84,62	84,62



			<i>Kab/kota x100%</i>								
3	<i>Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)</i>	<i>Persentase</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan SPLPD / Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah X100%</i>	2,56%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	45%
4	<i>Indeks Pembangunan Statistik (IPS)</i>	<i>Indeks</i>	<i>5 Domain: Prinsip Satu Data Indonesia, Kualitas Data, Proses Bisnis Statistik, Kelembagaan, Statistik Nasional.</i>	2,37	2,37	2,42	2,47	2,52	2,57	2,62	2,62



			Setiap Domain terdiri dari beberapa aspek dan setiap aspek terdiri dari beberapa indikator								
5	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Persentase	Nilai Indeks KAMI hasil verifikasi / Nilai Optimal Indeks KAMI (918) X100%	23,4	23,5	23,6	23,7	23,8	23,9	24	24

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025



Pada tabel di atas menunjukkan Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika yang menekankan pada peningkatan keterhubungan internet, layanan publik digital, serta transparansi informasi. Target capaian antara lain peningkatan persentase OPD yang terhubung internet dari 43,59% (2025) menjadi 84,62% (2030), serta layanan publik online terintegrasi dari 43,59% menjadi 74,49% pada periode yang sama. Selain itu, akses masyarakat terhadap informasi publik dan program pemerintah serta penggunaan data statistik oleh OPD ditargetkan konsisten mencapai 100% setiap tahun. Sementara itu, tingkat keamanan informasi pemerintah ditingkatkan secara bertahap dari 27,15% (2025) hingga 36,90% (2030). Indikator ini menggambarkan upaya penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang transparan, akuntabel, dan aman.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan disusun untuk periode lima tahun, yaitu dari 2025 hingga 2029. Dokumen ini memuat perencanaan menyeluruh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, penerima manfaat, serta rencana kebutuhan pendanaan secara indikatif.

Renstra ini diharapkan dapat memperkuat keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kinerja, serta menjadi landasan dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan perangkat daerah. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2025–2029 memerlukan dukungan penuh dan komitmen dari pimpinan untuk menjalankan tugas serta tanggung jawab institusionalnya.

Dengan disusunnya dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025–2029 ini, diharapkan menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan kebijakan di lingkungan Diskominfo. Selain itu, dokumen ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan pelayanan publik, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Pacitan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika



Kab. Pacitan. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan. Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025–2045 serta RPJMD Kabupaten Pacitan periode berjalan.
2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara input, output, dan outcome.
3. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.
5. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2025 - 2029 dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan,



sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2025 - 2029. Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.



Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pacitan